



**KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA UANG PALSU**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

PONIMAN, SH.
B4A 099 126

Pembimbing :

Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.
NIP. 130350519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2002**

KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU

Disusun Oleh :

PONIMAN, SH.
B4A 099 126

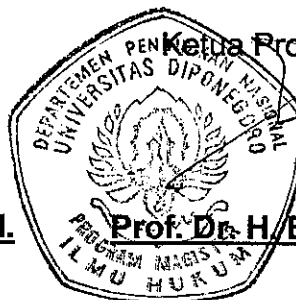
Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 April 2002

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Rembimbing,



Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
NIP. 130350519



Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
NIP. 130350519

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul ***KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU***.

Tesis ini membahas sejauh mana penerapan hukum pidana yang terdapat pada KUHP (WVS) dalam menanggulangi Tindak Pidana Uang Palsu. Mengingat Tindak Pidana Uang Palsu ini telah meresahkan masyarakat dan berdampak terhadap kepercayaan Internasional terhadap rupiah, maka dipandang perlu adanya keseriusan dalam mencari solusi-solusi yang lebih baik, berbobot dan dapat bermanfaat sehingga tidak terjadi Perluasan Tindak Pidana Uang Palsu.

Dorongan dan bantuan yang sangat besar baik moril maupun materiil untuk mengikuti Program S2 di Universitas Diponegoro sampai penyelesaian penulisan tesis ini telah diberikan oleh Ir. Salahudin Susila sebagai Pembina Mental. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melindungi dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau beserta keluarganya.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu baik dalam penulisan tesis maupun selama penulis menempuh studi di Universitas Diponegoro, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, baik sebagai Ketua Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Pembimbing tesis maupun sebagai guru, yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.

2. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.
3. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH sebagai Asisten Pembimbing Tesis maupun sebagai guru, yang telah banyak memberikan bimbingan, perhatian dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.
4. Bapak Paulus Hadi Suprpto, SH. MH yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini dan melimpahkan sebagian ilmunya yang paling berharga.
5. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH. yang telah memberikan pemahaman mengenai metodologi penelitian hukum.
6. Bapak Irjen Pol. Drs. Erwin Map sebagai Kapolda Jawa Tengah yang telah memberi petunjuk lewat Bapak Kombes Pol. Ade Rahardja, selaku Kadit Serse tentang perolehan data penanganan Tindak Pidana Uang Palsu Seajaran Polda Jawa Tengah.
7. Bapak Drs. Fakhrizal sebagai Kabag Reserse Ekonomi Polda Jawa Tengah yang telah memberikan data penanganan Kasus Tindak Pidana Uang Palsu di Polda Jawa Tengah.
8. Bapak Haryanto selaku Ka Sub Bag Pembayaran BI yang telah bersama-sama penulis dalam mensosialisasikan Tindak Pidana Uang Palsu dan solusi penanganannya, disini penulis banyak memperoleh data temuan Uang Palsu dari BI Cabang Semarang dari Bank-bank Wilayah Jawa Tengah dan DIY dan ciri-ciri Kepalsuan Uang Rupiah.
9. Bapak Pimpinan PT. Pura Sakti Kudus yang telah memberi masukan data dan ciri-ciri pemalsuan Uang Rupiah dan teknik pembuatan uang kertas yang disampaikan pada Seminar Upal di Mapolda Jawa Tengah bulan Juli tahun 2001.
10. Bapak Kopol Maryoto sebagai Ka Sub Bag Anev Reserse Bag Ekonomi Polda Jawa Tengah yang telah membantu melengkapi Juklap kebijakan-kebijakan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Uang Palsu.

11. AKP Suparmin, SH, M.Hum selaku Kanit Inprodag Dit Serse Ekonomi Polda Jawa Tengah yang telah membantu data penemuan Upal Wilayah Polda Jawa Tengah.
12. Sahabatku IPDA Ujang Syamsudin, selaku Ka Induk PJR Wilayah Purwokerto, IPDA Priharto, IPDA Maskur yang telah memberi semangat pada penulis dalam mengikuti studi S2 di UNDIP Semarang.
13. Sahabat-sahabatku Bripka Edy Sulistiyono, Bripka Yascur Caniago, Bripka Suwondo, Bripka Sukiran, Bripda Kambali, yang telah memberi semangat dalam menempuh studi S2 Bidang Hukum UNDIP Semarang.
14. Sdr. Bram (*BRAMANDA Computer*) yang telah membantu dalam melancarkan segala macam urusan pengetikan.

Semoga Allah SWT membalas segala budi baik mereka yang telah diberikan kepada penulis.

Walaupun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, namun karena keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya tesis ini masih perlu untuk disempurnakan. Untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Bagaimanapun juga penulis tetap berharap tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah perbendaharaan literatur mengenai uang palsu.

Semarang, September 2001

Penulis,

PONIMAN
B4A 099 126

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"..... Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat"

(2.S. Al Mujaadalah ayat 11)

Karya tulis ini dipersembahkan untuk :

Ibunda, yang telah memberikan kasih sayang. Ayahanda yang telah tiada "Bapak Salim Tarmudi (Alm) sebagai guru kehidupanku, Bapakku dan sebagai Kiaiku yang telah mengajarkan harga diri, keteguhan dalam prinsip dalam membela kebenaran. Juga persahabatan istri dan anakku Suryantini, Awang Gia Miftakhul Iman yang telah memberi motivasi untuk maju.

ABSTRAKSI

Tindak Pidana Uang Palsu ternyata telah meresahkan masyarakat, dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, juga mempengaruhi pandangan dunia internasional terhadap Uang kertas Negara Republik Indonesia (UNKRI). Hal ini terbukti dengan adanya data penanganan proses penyidikan POLRI Polda Jawa Tengah yang telah menyidik selama 5 (lima) tahun dari tahun 1997 sampai tahun 2001 dengan jumlah Tindak Pidana 157, jumlah Barang Bukti (BB) yang ditemukan Rp 737.950.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah pelaku 308 orang pemalsu dengan cara cetak offset, copy colour, lukis dan rata-rata penerimaan Bank Indonesia (BI Cabang Semarang) rata-rata per hari seratus sampai dua ratus ribu rupiah uang palsu. Nominal pecahan yang dipalsu Rp 5.000,- Tahun Emisi 1992, Rp 10.000,- Tahun Emisi 1998, Rp 20.000,- Tahun Emisi 1998, Rp 50.000,- Tahun Emisi 1999 dan Rp 100.000,- Tahun Emisi 1999.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu dengan Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Bab X mengenai pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank yaitu Pasal 244 yang mengatur pemalsuan uang, sedangkan Pasal 245, 246, 247, 249, 250, 250 Bis, 251, 252 KUHP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pemalsuan uang.

Maka dari itu perlu adanya penyempurnaan pidana pada kebijakan hukum pidana antara lain :

1. Perlu dimasukkannya perubahan jenis sanksi pidana dari Pidana Penjara 15 tahun bagi pemalsu, 20 tahun bagi pengulangan tindak pidana (residivis). Pasal 244, Pasal 247 KUHP sebagaimana dijelaskan pada Pasal 486 KUHP penulis usulkan menjadi Pidana Mati atau seumur hidup dan dengan sanksi pidana denda yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku.
2. Oleh karena Tindak Pidana Uang Palsu sangat meresahkan masyarakat, maka Inpres No. 1 Tahun 1971 tentang Botas Upal :
 - a. Dihidup-tumbuh-kembangkan
 - b. Koordinasi antar lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengadaan uang (baik teknik maupun taktisnya)
 - c. Perlunya pakar hukum dan kriminolog bersatu dalam merumuskan peraturan perundang-undangan guna penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu.

ABSTRACT

Crime of Counterfeiting Currency was make community restlessness and affected to the public reliability to the government, also influenced the international performance of Indonesian bill. This is proofed with the Central Java Police investigation data that had investigated in 5 (five) years ago from 1997 to 2001 with 157 Criminal Act for bill imitation, the proof goods was found in Rp.737.950.000, with 308 of imitator which done by offset printing, color copying, painting. In daily average the Central Java Indonesian Bank receipt Rp.100.000 – 200.000 of imitated money, the nominal imitations are Rp.5.000 (1992 emission), Rp.10.000 (1998 emission), Rp.20.000 (1998 emission), Rp.50.000 (1998 emission) and Rp.100.000 (1999 emission).

The preventive effort Crime of Counterfeiting Currency with Criminal Code (KUHP) were arranged in Chapter X about the money imitations, the bill of the state and bank bill that are 244 section that arranged the money imitation. Whereas the sections 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252 of KUHP are the sections that involved with the money imitation.

Therefore, it is necessary to completing the act in the capability criminal law, there are:

1. It is important to include the alteration of the kind of punishment sanction from 15 years prison for imitator, 20 years prison for recriminate action (recidivist). 244 section, 247 section KUHP as explanations in section 486 KUHP, writer want to be dead punishment or long live prison and with fine sanction as suitable with situation and condition of criminal act.
2. Because the criminal act of money imitation very restless the community, so the President Instruction No. 1 in 1971 about the imitated money :
 - a. Be growth up.
 - b. The coordination between the institutions that involved with money emission either on technical or in tactical.
 - c. It is importance for the law experts and criminal experts were allied to formulate the act regulation to prevent the Criminal Action of Money Imitation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. KONTRIBUSI PENELITIAN.....	11
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
F. METODE PENELITIAN	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Metode Penentuan Sampel.....	26
4. Jenis dan Sumber Data.....	27
5. Metode Pengumpulan Data	29
6. Metode Penyajian dan Analisis Data.....	30
G. SISTEMATIKA PENULISAN	30

	Halaman
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	31
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI UANG	31
1. Pengertian Uang	31
2. Fungsi Uang	32
B. DASAR HUKUM PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH DI INDONESIA.....	33
C. CIRI-CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH.....	37
1. Ciri-ciri Pada Bahan Uang.....	37
2. Ciri-ciri Pada Desain Warna	40
3. Ciri-ciri Pada Teknik Cetak Uang	40
D. PEMALSUAN UANG RUPIAH	53
E. TINDAK PIDANA UANG PALSU	55
F. KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN SOSIAL.....	62
1. Peristilahan dan Pengertian Kebijakan Sosial	62
2. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial.....	65
 BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. KEBIJAKAN LEGISLATIF (Formulatif) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU (IUS CONSTITUTUM)	81
B. KEBIJAKAN YUDIKATIF (Aplikatif) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU	95

	Halaman
C. KEBIJAKAN LEGISLATIF (Formulatif) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UPAL DIMASA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM).....	118
1. Kebijakan Pencegahan/Tindakan Preventif Sebelum Diterapkannya Hukum Pidana (KUHP)	121
2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu (Upal) Dengan Hukum Pidana di Masa Yang akan datang (Ius Constituendum)	123
BAB IV PENUTUP	134
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

	Halaman
Bagan 1 Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial	14
Bagan 2 Hubungan Antara Kebijakan Kriminal Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.....	70
Bagan 3 Hubungan Antara Kebijakan Kriminal, Kebijakan Penegak Hukum dan Kebijakan Sosial.....	70
Bagan 4 Data Tindak Pidana Uang Palsu Se Jajaran Polda Jateng Tahun 1997.....	106
Bagan 5 Data Tindak Pidana Uang Palsu Se Jajaran Polda Jateng Tahun 1998.....	107
Bagan 6 Data Tindak Pidana Uang Palsu Se Jajaran Polda Jateng Tahun 1999.....	108
Bagan 7 Data Tindak Pidana Uang Palsu Se Jajaran Polda Jateng Tahun 2000.....	109
Bagan 8 Data Tindak Pidana Uang Palsu Se Jajaran Polda Jateng 5 Tahun Terakhir Tahun 1997 s.d. 2001	112
Gambar 1 Uang Pecahan Rp 100.000 Tahun Emisi 1999	44
Gambar.2. Uang Pecahan Rp. 50.000. Tahun Emisi 1999.....	46
Gambar 3 Uang Pecahan Rp 20.000 Tahun Emisi 1998	48
Gambar 4 Uang Pecahan Rp 10.000 Tahun Emisi 1998	50
Gambar 5 Uang Pecahan Rp 5.000 Tahun Emisi 1992	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Modernisasi berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia, apalagi dengan semaraknya isu globalisasi akibat dari kemajuan teknologi, telekomunikasi¹ dan informasi, yang telah berkembang pesat sehingga di dunia ini tidak ada yang tidak tertembus oleh arus informasi global². Perkembangan ini memacu negara berkembang untuk menyesuaikan diri terhadap negara maju agar tidak terkucil dari pergaulan dan berposisi pada pandangan internasional dengan cara melakukan proses modernisasi³, seperti halnya penyesuaian terhadap Sistem Pengamanan Uang. Uang Kertas Negara RI (UKNRI) belum mampu menyesuaikan, membiayai dengan teknologi tinggi agar UKNRI mempunyai sistem penanganan yang handal seperti negara-negara maju.

¹ E. Suherman, *Kemajuan Teknologi Suatu Tantangan Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1988, hal 91.

² Arief Hidayat, *Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia Pada Era Global*, Majalah Ilmiah UNDIP, Semarang, 1998, hal 3.

³ Dentoeny Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satyawacana, Salatiga, 1999, hal 14.

Apapun konotasinya, apa yang disebut modernisasi dan globalisasi itu tidak bersifat fakultatif, tetapi merupakan fenomena yang harus dihadapi (*change is not optional*).⁴

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dewasa ini, merupakan kendala bagi bangsa Indonesia dalam pengamanan Uang Kertas Negara RI karena Harga Mesin Sortir Uang Kertas (MSUK) terlalu mahal, dan pengidentifikasian dengan bantuan alat sederhana (misalnya lampu UV) dan tanpa bantuan alat (mata telanjang) masih kurang teliti dan kurangnya pengetahuan masyarakat, mengakibatkan Perkembangan Peredaran Uang Palsu semakin pesat dan meresahkan masyarakat.⁵

Dikatakan oleh **Harjanto**, Kabag Pembayaran BI Cabang Semarang, bahwa pemalsuan uang merupakan salah satu objek pemalsuan yang paling rawan dan meraja lela dimana-mana dan merambah ke hampir semua aspek kehidupan, pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Selain dapat mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri, juga dapat berpengaruh terhadap kewibawaan negara di mata internasional.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal vii.

⁵ Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah disampaikan pada Seminar Upai, Temanggung 19 September 2001, hal 7.

Masyarakat adalah pihak yang paling menderita akibat pemalsuan uang ini, karena diantara mereka adalah golongan menengah ke bawah dengan segala keterbatasannya.

Sementara kurangnya pengetahuan masyarakat mengenali keaslian rupiah, maka perlu dimasyarakatkan alat identifikasi sederhana dengan harga terjangkau, misalnya filter untuk melihat *Scramble Image*, lampu Ultra Violet dapat digunakan untuk melihat adanya pemedaran pada uang asli, menggunakan gesekan pensil pada kertas tipis dapat melihat cetakan intaglio yang timbul dan lain sebagainya

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat akibat globalisasi bisa berarti positif juga, membawa dampak salah satunya di bidang ekonomi. Fenomena yang timbul dari perkembangan global antara lain adalah pemalsuan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup walaupun orang bekerja yang utama mencari nafkah⁶, tetapi kalau melakukan pemalsuan uang dapat dipidana.

Menurut data Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah yang berasal dari Bank Indonesia (BI), rata-rata Uang Kertas Negara Republik Indonesia (NKRI) yang dipalsukan adalah uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) emisi tahun atau tahun pembuatan 1992, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) emisi tahun 1992/1998, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) emisi tahun 1992/1995/1998, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

⁶ Abdul Wahid, Anang Sulistiyo, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997, hal 135.

rupiah) emisi tahun 1993/1995/1999, juga pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999.

Menurut **Yong Sudarsono**, Staf Bagian Reserse Ekonomi Dit Serse Polda Jawa Tengah, pemalsuan uang baik memalsu uang pecahan Rp. 5.000,-; Rp. 10.000,- ; Rp. 20.000,- ; Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- rata-rata tiga hari sekali menerima temuan barang bukti Upal dari Bank Indonesia (BI) dari Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,-.

Data di Polda Jawa Tengah 1997 s/d 2001 terdata 157 kasus, Barang Bukti Upal Rp 737.950.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah pelaku 308 orang. Dengan demikian rata-rata perbulan terjadi 5 sampai dengan 6 kasus, sedangkan tahun 2002, Januari sampai dengan April 2002 jumlah 3 (tiga) kasus dengan Barang Bukti Upal Rp 650.000,- nominal pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 1999 dan Rp. 100.000,- emisi tahun 1999. Dengan demikian secara kuantitatif jumlah kasus berkurang, secara kualitatif bertambah.⁷

Seperti halnya kejadian yang lalu dengan diperiksanya seorang Perwira Menengah Kolonel Sumaryono di Polda Jawa Timur diduga keras terlibat pemalsuan uang dengan barang bukti uang palsu sebanyak kurang lebih Rp 4,7 milyar rupiah, merupakan salah satu contoh Tindak Pidana Uang Palsu yang terungkap.⁸ Kalau ternyata

⁷ Data Kapolres, Kapolresta Poltabes Semarang yang dilaporkan Kepala Wilayah dari tahun 1997 s/d tahun 2000 dan laporan periode Januari sampai dengan April 2002 yang terhimpun pada bulan April 2002 di Polda Jawa Tengah.

⁸ Harian Suara Merdeka bulan Pebruari tahun 2000, Ditemukan Barang Bukti Uang Palsu Rp 4,7 Milyar di Polda Jawa Timur.

proses peradilannya tidak jelas, hal ini merupakan kendala proses yang mungkin dipolitisir sehingga sulit dinyatakan sebagai kejahatan⁹.

Apakah hanya sejumlah itu saja barang bukti yang dinyatakan Uang Palsu, masih merupakan tanda tanya besar, karena setelah dan sebelum kasus itu masih banyak barang bukti Upal ditemukan dalam jumlah besar, baik oleh Kepolisian maupun Bank Indonesia (BI). Ini berarti bahwa terungkapnya kasus Upal dengan barang buktinya di Polda Jawa Timur adalah sebagian kecil saja, dan dimungkinkan uang palsu yang masih beredar masih banyak dan digunakan sebagai alat pembayaran yang syah¹⁰. Timbulnya Tindak Pidana Upal ini semua antara lain akibat dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang Tindak Pidana pemalsuan UKNRI dan salah satu penanggulangannya harus ada peranan Polisi yang senantiasa progres dalam mencari solusi-solusi penanggulangannya.¹¹

Fenomena lain yang timbul dengan laporan pengaduan masyarakat tanggal 21 Juni 2001 dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/72/VI/2001/Serse, korban mengambil uang tabungan di Bank terselib tiga lembar Rp 20.000,- (dua puluh ribuan) diduga palsu, dan beberapa kasus lain didapatkan uang palsu dari ATM, menunjukkan bahwa Uang Palsu sudah masuk Bank dan digunakan sebagai alat pembayaran yang

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, hal 6.

¹⁰ Kombes Pol Drs. Ade Rahardjo, SH., Wawancara Pribadi, Kadit Serse Polda Jateng, 1 Maret 2002.

syah, mestinya harus segera ditanggulangi oleh aparat yang berwenang dan seluruh masyarakat, perlunya diadakan solusi-solusi tindakan represif oleh aparat berwenang misalnya tindakan kepolisian dengan penahanan dan lain-lain¹².

Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu dengan Hukum Pidana, Penyidik Polda Jawa Tengah menerapkan Pasal 244 s/d Pasal 252 KUH Pidana. Sebagai kendala penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu, adalah sulit menemukan pelaku utamanya (aktor intelektualnya), karena terputus jaringan komunikasi antara pemalsu dengan pengedar. Kendala lain dalam pengungkapan barang bukti (BB) dibutuhkan biaya tinggi sebagai umpan dengan modus operandi pembelian Upal dari pelaku satu berbanding empat, dengan Uang Palsu, disamping sarana dan prasarana, mobilitas yang diperlukan untuk mengungkap jaringan ini¹³.

Dari 157 kasus Tindak Pidana Uang Palsu tahun 1997 s/d tahun 2001 putusan pengadilan rata-rata 3 bulan sampai 4 tahun penjara dilakukan berulang-ulang oleh pelaku pengedar yang sama. Hal ini menunjukkan ketidak-jeraan para pelaku, karena mungkin sanksi Hukum Pidana terlalu ringan dan tidak ada denda pada Pasal 244, 245 KUHP, atau memang masyarakat tak melakukan pencelaan terhadap Tindak

¹¹ Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 183 - 184.

¹² I.S. Susanto, *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam SPP*, UNDIP, Semarang, 1995, hal 18 – 19.

Pidana ini, baik secara lahir maupun bathin (jiwa manusia)¹⁴. Karena aturan, tindakan masyarakat sebagai salah satu kontrol sosial yang handal¹⁵ dan nilai kesepakatan inilah yang dipakai dan ditegakkan oleh negara¹⁶, mata rantai solidaritas sosial ini yang dapat disamakan dengan hukum represif¹⁷, dengan Hukum Pidana yang memberikan petunjuk dan larangan disertai sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana¹⁸. Keadaan demikian jika dibiarkan menjadi peluang bagi para pelaku utama (*actor intellectual*) dalam mengembangkan bisnis ilegalnya.

Dari data dan kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti guna memaksimalkan penanganan Kasus Tindak Pidana Uang Palsu yang berpengaruh tentang bagaimana peranan Criminal Justice System (CJS)¹⁹ dalam pengungkapan maupun Perundang-undangan yang memadai, mengingat Kasus Tindak Pidana Uang Palsu sudah bukan kasus toleransi melainkan sudah meresahkan masyarakat yang harus ditindak tegas.

Menurut Harjanto, Kabag Pembayaran BI Cabang Semarang dalam materi sosialisasi keaslian UKNRI dinyatakan bahwa kejahatan

¹³ AKP Supamin, SH, M.Hum, Wawancara Pribadi, Penyidik Upal Dit Serse Polda Jateng, 1 Pebruari 2002.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Polisi dan Residivis*, Seminar Kajian Residivis dan Pembinaannya, Jakarta, 14-15 Januari 1992.

¹⁵ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, 1994, hal 1.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik Kekuasaan dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982, hal 37.

¹⁷ A.A.G. Peters, Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, PT. Sinar Agape Press, Jakarta, 1988, hal 40.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, April 1993, hal 7.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hal 1.

Upai bisa dilatar belakangi karena masalah ekonomi dan juga bisa bernuansa politik, oleh **Barda Nawawi Arief** kejahatan yang bernuansa politik, kejahatan oleh pemegang kekuasaan termasuk *"White Collar Crime", Top Hat Crime*²⁰.

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan Uang Palsu, dengan menggunakan sarana "Penal" bukan merupakan kebijakan yang strategis dan sejak didirikan PBB upaya pencegahan penanggulangan kejahatan sudah dilakukan sebagai realisasi *Charter United Nation* dan *The Internasional Bill of Human Rights*²¹ menurut kesepakatan internasional (antara lain dalam Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*). Strategi dasar/pokok pencegahan kejahatan (*"The Basic Crime Prevention Strategy"*) harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

Jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk TP Upal) terletak pada kebijakan yang integral, preventif dan eliminatif dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab. Dengan kata lain, kebijakan strategis terletak pada kebijakan penanggulangan kausatif, hal inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan "Penal" dalam menanggulangi kejahatan, karena kebijakan "Penal" dalam

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2 Oktober 1999, Op Cit hal 3.

²¹ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional*, Bahan Penataran, Semarang 12 – 31 Januari 1993, hal 1.

menanggulangi kejahatan, lebih merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomatik.²²

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagian telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah "Kebijakan Penal dalam penanggulangan tindak pidana Uang Palsu". Sebagai sebuah kebijakan, maka kebijakan penal yang dimaksud disini meliputi kebijakan penanggulangan tindak pidana yang menggunakan hukum pidana (KUHP).

Dalam konteks pendekatan penal, penelitian akan menitikberatkan pada kebijakan legislatif (formulatif) dan kebijakan yudikatif yang merupakan tahap aplikasi, kemudian bagaimana kebijakan legislatif yang akan datang.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Legislatif (Formulatif) Ius Constitutum pada KUHP terutama pasal-pasal yang mengatur Tindak Pidana Upal dalam penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu ?
2. Bagaimana Kebijakan Yudikatif (Aplikatif) pada ketentuan KUHP dalam menanggulangi Tindak Pidana Uang Palsu ?

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2 Oktober 1999, Op Cit hal 1 - 2.

3. Bagaimana sebaiknya Kebijakan Legislatif (Formulatif) yang akan datang (Ius Constituendum) dalam menanggulangi Tindak Pidana Uang Palsu ?

Sehubungan dengan permasalahan pertama dan ketiga, akan diteliti berbagai kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana yang berhubungan dengan masalah Upal, yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHP sebagai Hukum Positif (Ius Constitutum) dan bagaimana Kebijakan Legislatif yang akan datang (Ius Constituendum) dalam penanggulangan Tindak Pidana Upal ?.

Dalam kaitannya dengan kebijakan legislatif, ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang meliputi **tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan (pidana)**.

Berkaitan dengan permasalahan kedua, akan diteliti penerapan ketentuan perundang-undangan dalam praktek melalui putusan-putusan pengadilan yang merupakan tahap aplikasi, dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan Upal.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah disebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan Kebijakan Legislatif (Formulatif) dalam penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu yang terdapat pada KUHP.

2. Untuk memahami dan menjelaskan Kebijakan Yudikatif (Aplikatif) ketentuan Tindak Pidana Uang Palsu yang terdapat dalam KUHP.
3. Untuk memahami dan menjelaskan Kebijakan Legislatif (Formulatif) yang akan datang (Ius Constituendum) dalam menanggulangi Tindak Pidana Uang Palsu.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan Upal. Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang berhubungan Upal, dalam hal ini kebijakan legislatif dan kebijakan aplikatif. Pengembangan kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan akan menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi para pengambil/pembuat kebijakan yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada sisi lain, dalam tahap kebijakan aplikatif, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak

hukum, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu polisi, jaksa, hakim maupun para pengacara. Secara umum, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah, sebagai salah satu alternatif untuk menangani berbagai persoalan yang berhubungan dengan fenomena Upal yang telah meresahkan masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Literatur Hukum Pidana, usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat sering disebut sebagai kebijakan atau politik kriminal yang telah ada dalam hasil Kyoto (1970) berupa *"The Declaration of The Prevention of Crime and The Treatment of Offender"*²³. Mengenai arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai/beragam pendapat.

Sudarto menyatakan bahwa politik kriminal dapat diberikan pengertian dalam **arti sempit**, dalam arti yang **lebih luas** dan dalam arti yang **paling luas**. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti paling luas,

²³ Muladi, *Kerja Sama Internasional Dalam Pencegahan Dan Peradilan Pidana*, Bahan Penataran FH.PTN/PTS Se Indonesia, Semarang, 12-31 Januari 1993, hal 4.

politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁴

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁵

Politik kriminal menurut **Barda Nawawi Arief** merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁷

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 7.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 30.

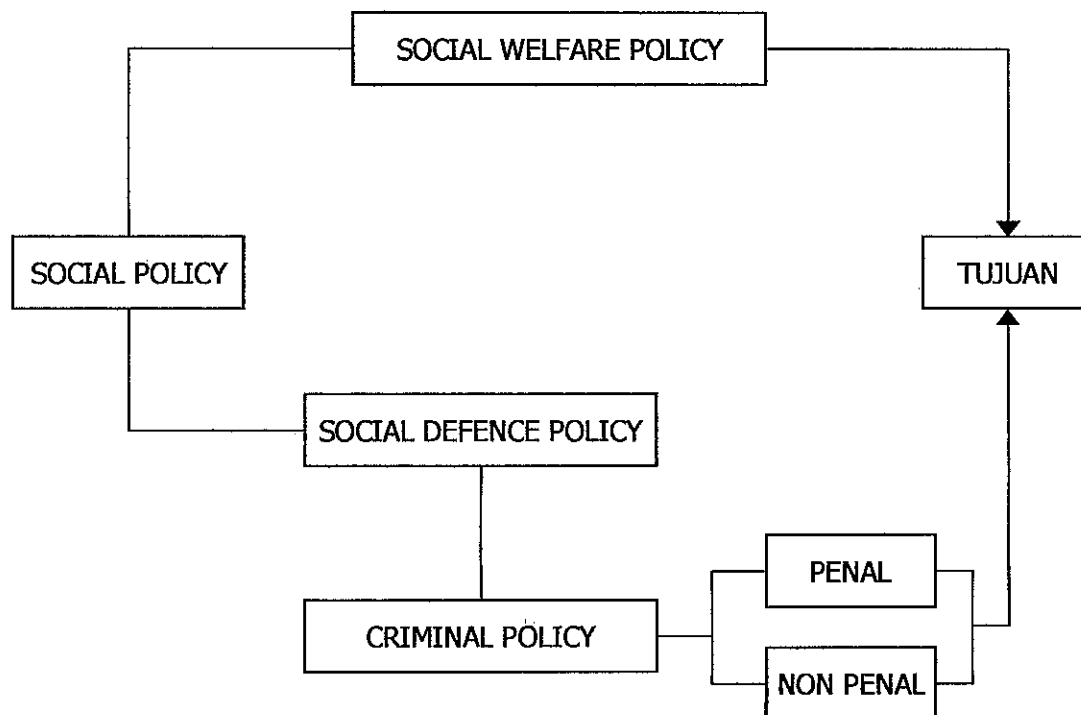
²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, halaman 2.

Lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, halaman 8.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ibid, halaman 3.

Lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, halaman 3.

Bagan 1

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN
KRIMINAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL

Dari gambaran di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan **Sudarto** yang menyatakan bahwa **"apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *"Planning for Social Defense"*. *Social Defense Planning* inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional"**.²⁸

Beberapa kali Kongres PBB mengenai *"Prevention of Crime and the Treatment of Offenders"* mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri **justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen**.²⁹

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh **Radzinowicz**, sebagaimana yang dikutip **Barda Nawawi Arief** yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasi bermacam-macam kegiatan preventif dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.³⁰

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ibid hal 5-9.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pernyataan tersebut antara lain terlihat dalam Kongres PBB ke-4 tahun 1970, Kongres PBB ke-5 tahun 1975, Kongres PBB ke-6 tahun 1980, Kongres PBB ke-7 tahun 1985 dan Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba, lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, halaman 9-11.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1994), halaman 34-35.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, **Muladi** menyatakan bahwa penegakan hukum pidana **bukan merupakan satu-satunya** tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “**masalah kemanusiaan**” dan “**masalah sosial**”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.³¹

Sejalan dengan pemikiran di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana, antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya (“pengobatannya”) hanya bersifat individual/personal, tidak bersifat fungsional/struktural, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif”.³²

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, Ibid hal 9.

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 47-49.

Dengan kata lain, penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah "eksistensinya" tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.³³

Meskipun demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "negara berdasarkan atas hukum".³⁴

Roeslan Saleh sebagaimana dikutip **Barda Nawawi Arief**, menyebutkan tentang masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, berdasarkan 3 (tiga) alasan, yaitu :

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batasan-batasan kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si pejabat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 169.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Ibid hal 7.
Menurut Barda Nawawi Arief, karena berbagai kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana tidak kemudian masalahnya bisa disederhanakan misalnya dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana.

Memperhatikan alasan-alasan di atas, maka nampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan beliau adalah **“adanya dasar susila dari hukum pidana”**.³⁵

Dalam konteks inilah, penegakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan masih diperlukan, yang kaitan ini harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Oleh karenanya, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan juga, yang sering disebut sebagai kebijakan hukum pidana.

Kebijakan atau politik hukum berarti orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, sedangkan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁶

Hal yang sama disampaikan oleh **Samodra Wibawa** yang mengatakan bahwa pembuatan kebijakan selain merupakan perjuangan politik dapat juga dipandang sebagai persoalan pemilihan alternatif.³⁷

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Ibid hal 153.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1981, Ibid hal 153.

³⁷ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*, Intermedia, Jakarta, 1994, Op Cit hal 20.

Sedangkan menurut **Mulder**, kebijakan (politik) hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui ;

1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁸

Berkenaan dengan penggunaan sarana penal (hukum pidana) dalam penanggulangan kejahatan, maka terdapat (dua) masalah sentral yaitu untuk menentukan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³⁹

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.⁴⁰

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, Op Cit hal 28.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang 1996, Ibid hal 35. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, halaman 160.

⁴⁰ Ibid hal 48.

Dalam hubungan tersebut, **Sudarto** mengingatkan untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal berikut, yaitu :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindak penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki" yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada pelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁴¹

Demikian pula **Bassiouni** seperti dikutip **Barda Nawawi Arief**, menyebutkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu :

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin dicapai;
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁴²

Sementara itu dalam konteks kebijakan publik, **Samodra Wibawa** mengingatkan bahwa suatu kebijakan haruslah didasarkan pada

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Ibid hal 36-39. Lihat juga, Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Op Cit hal 161.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, Op Cit hal 162.

keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya maka suatu kebijakan dianggap baik. Untuk itu pembuat kebijakan harus mengetahui berbagai hal berikut :

1. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya;
2. Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia;
3. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan; rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan;
4. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.⁴³

Dari berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas nampak bahwa penggunaan hukum pidana yang juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku⁴⁴ sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanyalah merupakan salah satu sarana saja dari sekian banyak sarana lain yang tersedia di dalam masyarakat⁴⁵.

Dikatakan oleh **Muladi**, hukum pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi pidana tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik.⁴⁶

⁴³ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*, Intermedia, Jakarta 1994, halaman 10.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hal 4.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid hal 40.

⁴⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum.

Persoalannya adalah masih sering terjadi pola pemikiran yang sempit tentang kebijakan penanggulangan kejahatan, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub-sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas yang meliputi pula penegakan hukum perdata dan hukum administrasi.⁴⁷

Oleh karenanya, sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakikatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.⁴⁸

Dilihat dari segi kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka sasaran/adresat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan "mengalokasikan kekuasaan", baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana

⁴⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1997, hal 97.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ibid hal 170.

(kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/administratif).⁴⁹

Dalam pandangan lain, **Barda Nawawi Arief** juga menyebutkan bahwa masalah pokok dari hukum pidana berada pada masalah hubungan kekuasaan antara negara dan warga masyarakat, yang mempunyai hubungan dengan konsep nilai sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural dari suatu masyarakat atau negara.

Dalam konteks yang demikian, munculnya fenomena sosial yang berhubungan dengan Upal merupakan salah satu bentuk tantangan sekaligus hambatan yang langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu tercapainya tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan yang terutama berbasis pada peningkatan kepercayaan pada rupiah, kewibawaan negara dan kepastian hukum.

Oleh karenanya persoalan Upal di Indonesia bukan saja semata-mata sebagai persoalan sosial tetapi juga merupakan persoalan hukum yang harus ditanggulangi melalui pendekatan kebijakan yang integral yaitu dengan jalan memadukan pendekatan kebijakan penal dan non-penal.

Dalam konteks kebijakan penal, segala sesuatu yang berhubungan dengan Upal dirumuskan sebagai tindak pidana melalui kriminalisasi, sebagaimana yang terlihat di dalam beberapa pasal KUHP (sebagian termuat di dalam bab kejahatan terhadap Upal).

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, di Semarang, 25 Juni 1994, hal 5.

Tindak Pidana Upal dapat bernuansa politik, **Barda Nawawi Arief** juga menyatakan, bahwa Tindak Pidana bernuansa politik, kejahatan oleh pemegang kekuasaan, kejahatan ini a.l. "kejahatan/tindak pidana jabatan," (*Crimes of the powerful*", "*abuses of public and political power*", "*Crimes by government*", "*Crimes of politicians in office*", "*Top-hat Crimes*", "*White Collar Crime*")⁵⁰.

Menurut **Dionysios Spinellis** (dalam "*Crime by Government*", ed. Dr. Helmut EPP, hal 19-23), "*Crimes of politicians in office*" (*Top-hat Crimes*") terdiri dari :

1. Pelanggaran terhadap aturan dasar/aturan pokok mengenai perjuangan kekuasaan dan permainan politik ("*Violations of the basic rules of the struggle for power and of the political game*"). Termasuk kelompok ini, antara lain "Penghianatan kepada negara" (*high treason*)," pelanggaran terhadap konstitusi negara"(*Violations of the constitution of the country*), "delik-delik pemilu" (*Offences related to elections*), "manipulasi dan intervensi ilegal dalam pemilu" (*Illegal manipulations and interventions in the elections*), "mata-mata politik" (*Political spying/espionage*);
2. Pelanggaran HAM warga masyarakat untuk meraih dan mempertahankan kekuatan politik. Antara lain, "*Political assassinations*" (disebut juga "*political murder*"), "*disappearances*"

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, hal 4.

(termasuk juga "*abduction*"/penculikan, pen), "*torture*", "*police brutality*", "*Unlawful arrests*".

3. Delik-delik yang biasa disebut sebagai korupsi dan skandal ekonomi. Termasuk a.l. : penggelapan kekayaan publik, penyuapan, favoritisme (pilih kasih) dalam pelelangan publik dan seleksi karyawan, penyalahgunaan informasi orang dalam, pemalsuan dokumen publik.
4. Semua delik lainnya yang dilakukan politisi/pejabat dalam melakukan tugasnya.⁵¹

Kemudian dalam rangka mengantisipasi Upal Kapolri mengeluarkan Juklap No. Pol : Juklap/72/II/1993 tanggal 1 Pebruari 1993 huruf c menyebutkan bahwa "Hal-hal yang perlu diperhatikan tidak diperkenankan memfoto copy dari setiap Upal yang ditemukan dan atau menyebarluaskan, pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik".

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana uang palsu, maka permasalahan tersebut hendak didekati dari sudut pandang kebijakan dengan menggunakan hukum pidana (KUHP).

⁵¹ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 5.

Dalam kebijakan hukum pidana (KUHP) akan meliputi tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan tahap kebijakan aplikatif, yang dalam hal ini akan digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris antara lain :

- * Kajian Undang-Undang
- * Azas-Azas Undang-Undang
- * Kebijakan Yudikatif

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini akan dianalisis dan dijelaskan kebijakan penal (kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana) yang terdapat pada KUHP dan yang akan datang.

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau judgmental atau sering juga disebut sebagai metode penarikan sampel yang bertujuan. Untuk memilih unsur-unsur dari sampel, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵²

Persyaratan tersebut antara lain meliputi :

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 196.

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam suatu studi pendahuluan.⁵³

Sehubungan dengan penentuan sampel seperti tersebut di atas, maka sampel terpilih akan terdiri dari beberapa unsur/kelompok, yaitu :

- a. Kelompok penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana yang meliputi : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara;
- b. Kelompok instansi terkait dalam pembuatan uang;
- c. Kelompok pakar hukum;
- d. Kelompok pengusaha;
- e. Kelompok eksekutif/penentu kebijakan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan dari responden atau nara sumber;

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ibid hal 40.

- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini penggunaan data diutamakan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Data Sekunder meliputi :

- a. Data Sekunder yang bersifat publik seperti :
 - 1). Data arsip Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu.
 - 2). Data resmi pada instansi Pemerintah (Polda Jateng)
 - 3). Data yang dilaporkan Polwil-Polwil Sewil Polda Jateng
- b. Data Sekunder di bidang hukum yang meliputi :
 - 1). Pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Uang Palsu pada KUHP, dari Pasal 244 s/d Pasal 252 Bab IX s/d Bab XIII tahun 1946.
 - 2). Bahan-bahan hukum sekunder seperti Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
 - 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus, Bibliografi, Ensiklopedia maupun Indeks Kumulatif.⁵⁴

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid hal 11-12.

- c. Sumber data primer yaitu responden atau nara sumber⁵⁵

Data primer ini diperoleh dari berbagai lembaga atau perorangan yaitu meliputi komponen-komponen yang relevan dengan obyek penelitian seperti : Kalangan Bank, penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pengacara), instansi pembuat uang, kelompok hukum, kelompok eksekutif/penentu kebijakan.

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan penelitian dan data yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi Dokumentasi, yang terdiri dari :
 - 1) Data laporan terjadinya Tindak Pidana Uang Palsu dari tahun 1997 s/d 2000 di wilayah Polda Jawa Tengah⁵⁶.
 - 2) Data laporan Bank Indonesia Cabang Semarang tentang Penemuan Uang Palsu dari Bank di Wilayah Jateng DIJ⁵⁷.
 - 3) Data Tindak Pidana Uang Palsu di Dit Serse Polda Jateng Tahun 1997 s/d 2001.
- c. Studi Lapangan pada obyek yang berhubungan dengan bahasan.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Kumulatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 29.

⁵⁶ Laporan Tindak Pidana Upal menurut Juknis/21/VIII/1991; Agustus 1991 harus dilaporkan ke Kapolri selama 1 x 24 jam dengan laporan tertuju/Lapju dan Hasil penyidikan bagi Reserse Polri dengan Juklap/72/II/1993, tanggal 1 Pebruari 1993.

⁵⁷ Bank Indonesia dalam rangka menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 1971 tentang Pembentukan BOTASUPAL, dengan koordinasi kerja sama dengan Penyidik di tingkat daerah.

6. Metode Penyajian dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data, wawancara dan observasi setelah melalui proses identifikasi, diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisa kemudian disajikan secara diskriptif kualitatif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebelum membahas pokok-pokok masalah, setelah uraian pendahuluan pada Bab I ini dikemukakan Tinjauan Pustaka, pada Bab II. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai Pengertian dan Fungsi Uang, Dasar Hukum, Pengeluaran Uang dan Pengedaran Uang Rupiah di Indonesia, Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Pemalsuan Uang Rupiah, Tindak Pidana Uang Palsu dan Kebijakan Kriminal sebagai bagian dari Kebijakan Sosial yang menjelaskan peristilahan dan pengertian kebijakan serta Kebijakan Kriminal sebagai Kebijakan Sosial.

Kemudian pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan diuraikan Kebijakan Legislatif (Formulatif) pada KUHP dan Kebijakan Yudikatif (Aplikatif) Penerapan Tindak Pidana Upal serta Kebijakan Legislatif (Formulatif) dalam penanggulangan Tindak Pidana Upal di masa yang akan datang (Ius Constituendum).

Akhirnya dalam Bab IV (Penutup) dirumuskan Kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Kemudian sebagai tindak lanjut dari kesimpulan-kesimpulan penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI UANG

1. Pengertian Uang

Secara sederhana uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar-menukar. Sedangkan uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

Uang kertas terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Uang kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Uang Pemerintah)
- b. Uang kertas yang dikeluarkan oleh bank yaitu yang disebut Uang Bank.

Pada masa pemerintah Republik Indonesia kita mempunyai Uang Pemerintah yang dikeluarkan pada masa awal pemerintahan kita setelah kemerdekaan yang dikenal dengan "ORI" (Oeang Republik Indonesia). Sesudah itu uang kertas yang beredar adalah semuanya uang bank yaitu uang yang dicetak dan diedarkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang mempunyai hak monopoli untuk membuat/mencetak dan mengedarkan uang yang disebut dengan HAK OKTROI sesuai dengan peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sirkulasi.⁵⁸

⁵⁸ Bank Indonesia Semarang, *Materi Penyuluhan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Semarang, 2001, hal 1-12.

2. Fungsi Uang

a. Uang sebagai alat tukar menukar

Dengan adanya uang, pertukaran dua macam barang atau lebih tidak perlu dilakukan secara langsung pada saat yang bersamaan (secara barter) karena semua barang dapat diukur nilainya dalam mata uang yang berlaku. Hal tersebut telah dirasakan dapat memperlancar proses penukaran, mendorong spesialisasi kerja dan menumbuhkan pasar barang/pasar jasa. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*).

b. Uang sebagai alat satuan hitung

Penilaian atas suatu barang/jasa dapat dinyatakan dalam satuan uang sehingga sangat mempermudah perbandingan nilai dari berbagai macam dan jumlah dari barang/jasa. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat satuan hitung (*unit of account*).

c. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan

Disamping itu uang mempermudah perbuatan menabung karena orang tidak perlu lagi menumpuk kekayaan dalam bentuk barang yang menimbulkan masalah tempat penyimpanan dan resiko yang tinggi. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*).

d. Uang sebagai alat penyelesaian hutang piutang

Dengan adanya uang, transaksi pinjam-meminjam antara pihak yang berlebihan (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan (*devisit unit*) dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dalam hal ini uang telah berfungsi sebagai alat penyelesaian hutang-piutang (*standard of deferred payments*).⁵⁹

B. DASAR HUKUM PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH DI INDONESIA

Dasar hukum pengeluaran dan pengedaran uang rupiah di Indonesia, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi :

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam penjelasan Undang-Undang dasar tersebut dikemukakan bahwa "Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang".

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Central, mengatur:

a. Pasal 2

- 1). Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

⁵⁹ Ibid, hal 17.

- 2). Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
- 3). Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 4). Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5). Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

b. Pasal 3

- 1). Uang rupiah jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- 2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

c. Pasal 19

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

d. Pasal 20

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnakan uang dimaksud dari peredaran.

e. Pasal 21

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea materai.

f. Pasal 22

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.

g. Pasal 23

- 1). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan pengganti dengan nilai yang sama.
- 2). Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang

yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.

- 3). Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.
- 4). Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- 5). Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁶⁰

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/52/Kep/Dir.UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang.
4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada waktu penerbitan uang rupiah baru.⁶¹

⁶⁰ UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Central.

⁶¹ Keputusan Direksi BI No. 13/52/Kep/Dir. UPU, tanggal 1 Desember 1980, hal 4-6.

C. CIRI-CIRI KEASLIAN UANG RUPIAH

Keaslian rupiah dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang (kertas, plastik atau logam), desain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun teknik pencetakannya.

Sebagian dari ciri-ciri yang terdapat pada uang rupiah tersebut, selain berfungsi sebagai ciri untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, dapat berfungsi juga sebagai alat pengamanan dari ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Alat pengamanan tersebut terdiri dari alat pengaman yang kasat mata, kasat raba dan pengamanan yang baru terlihat dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultra violet (*UV lights*), sinar infra merah (*infra red lights*), kaca pembesar (*loupe*), dan plastik tertentu untuk melihat *scramble image*.

1. Ciri-ciri Pada Bahan Uang

Bahan yang digunakan untuk membuat uang kertas rupiah dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan ciri-ciri tertentu yang ditujukan untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Bahan uang tersebut dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu kertas dan bahan plastik (*Polymer*).

a. Bahan Kertas Uang

Ciri-ciri yang terdapat pada bahan kertas uang terdiri dari :

1). Bahan Kertas Uang

Adalah kertas yang terbuat dari serat kapas atau campuran dengan bahan lainnya, yang diproses secara khusus sehingga tidak memendar di bawah sinar ultra violet (*UV lights*).

2). Tanda Air (*Water Mark*)

Adalah gambar berupa kepala pahlawan nasional yang dibuat dengan cara menipiskan serat kertas sehingga terlihat terlihat jelas apabila diterawangkan ke arah cahaya, baik dari bagian muka maupun bagian belakang.

3). Benang Pengaman (*Security Thread*)

Adalah bahan dari plastik yang ditanam pada kertas uang dan akan terlihat sebagai garis melintang dari atas ke bawah apabila diterawang ke arah cahaya.

Benang pengaman tersebut dapat dibuat tidak memendar (*fluorescent*) dibawah sinar ultra violet dengan penampakan satu warna (*single color fluorescent*) atau beberapa warna (*multi color/rainbow fluorescent*).

4). *Electrotype*

Adalah gambar berbentuk hiasan yang dibentuk dengan cara seperti pembuatan tanda air (*water mark*) namun lebih tipis sehingga akan terlihat lebih terang dari penampakan tanda air, apabila diterawangkan ke arah cahaya.

5). Serat-serat (*Vibres*)

Adalah serat berwarna yang disebarkan secara acak di atas kertas uang sehingga penempatannya tidak pernah sama pada setiap lembar uang. Serat tersebut terdiri dari serat yang kasat mata dan serat yang baru terlihat apabila disinari dengan ultra violet.⁶²

b. Bahan Plastik (*Polymer*)

Ciri-ciri yang terdapat pada bahan plastik (*polymer*) terdiri dari :

1). Bahan Plastik (*Polymer*)

Adalah plastik yang terbuat dari bijih plastik yang diproses secara khusus dengan diberi lapisan (*coating*) sehingga tidak memendar dibawah sinar ultra violet (*UV lights*).

2). Bayangan Gambar (*Translucent Shadow Image*)

Adalah bayangan gambar yang dapat dilihat dibawah cahaya dari sisi tertentu.

3). Jendela Transparan (*Transparent Security Window*)

Adalah jendela transparan yang memuat gambar hologram (*Optically Variable Divices/OVD*) yang terlihat dari sisi muka dan belakang serta akan menampakkan perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

⁶² Bank Indonesia, *Uang Kertas rupiah Indonesia*, Semarang, 2001, hal 1-2

4). Jendela Berwarna (*Color Security Window*)

Adalah jendela transparan yang berwarna dan memuat suatu filter untuk melihat gambar (*metameric print*) di sisi tertentu yang berfungsi sebagai alat penguji keaslian uang (*self-authentication*).⁶³

2. Ciri-ciri Pada Desain Warna

Desain dan warna dari setiap pecahan uang rupiah telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ciri-ciri tertentu, baik untuk keperluan keindahan maupun untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang, yang meliputi :

- a. Gambar utama bagian muka dan bagian belakang.
- b. Gambar dan ornamen pendukung lainnya.
- c. Warna dominan uang.
- d. Ukuran uang.

3. Ciri-ciri Pada Teknik Cetak Uang

Teknik cetak uang rupiah yang dilakukan oleh perusahaan percetakan uang dapat memberikan ciri-ciri tertentu, baik untuk keperluan keindahan maupun untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Tinta cetak yang digunakan dalam pencetakan uang merupakan *security ink* yang istimewa dibanding

⁶³ Ibid hal 5.

dengan tinta cetak untuk pencetakan securitas lainnya. Teknik cetak tersebut adalah terdiri dari :

a. Cetak Intaglio

Adalah hasil cetak timbul berbentuk relief yang terasa kasar apabila diraba. Hasil cetakan ini merupakan alat pengaman yang sangat tinggi terutama pada bagian wajah gambar utama, karena pada setiap wajah yang digunakan sebagai gambar utama memiliki karakteristik masing-masing sehingga akan sulit untuk dipalsu.

b. *Rectoverso (See Trough Register)*

Adalah hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi antara bagian muka dan belakang sehingga penampakkannya waktu diterawangkan ke arah cahaya tidak boleh bergeser sedikitpun.

c. Nomor Seri Yang Memendar

Adalah hasil cetak berupa nomor seri yang selain kasat mata juga akan memendar dibawah sinar ultra violet.

d. *Latent Image/Multilayer Latent Image*

Adalah hasil cetak lebih dari satu objek dalam suatu tempat yang akan tampak jelas apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

e. Hurup/Angka Micro

Adalah hasil cetak berupa hurup/angka dengan ukuran yang sangat kecil sehingga baru dapat dibaca jelas apabila dilihat dengan menggunakan kaca pembesar.

f. Hasil Cetak Yang Tidak Kasat Mata (*Invisible Ink*)

Adalah hasil cetak dengan menggunakan tinta khusus sehingga tidak kasat mata dan baru akan terlihat jelas apabila disinari dengan ultra violet.

g. Tinta Berubah Warna (*Optical Variable Ink/OVI*)

Adalah hasil cetak yang mengkilap (*glittering*) yang warnanya akan berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Teknik cetak ini dilakukan untuk menghindari ancaman pemalsuan dengan mesin foto kopi berwarna.

h. Latar (*Screen*)

Adalah hasil cetak berupa garis yang sangat halus dengan satu atau beberapa warna yang memberikan kesan warna dominan dari suatu pecahan uang.

i. *GUILLOCHE*

Adalah hasil cetak berupa garis-garis sangat halus yang tidak terputus dan membentuk alur-alur seperti rajut.⁶⁴

Penggunaan dan penempatan ciri-ciri keaslian yang terdapat pada setiap uang kertas rupiah yang beredar saat ini, dapat dilihat pada penjelasan gambar-gambar di bawah.

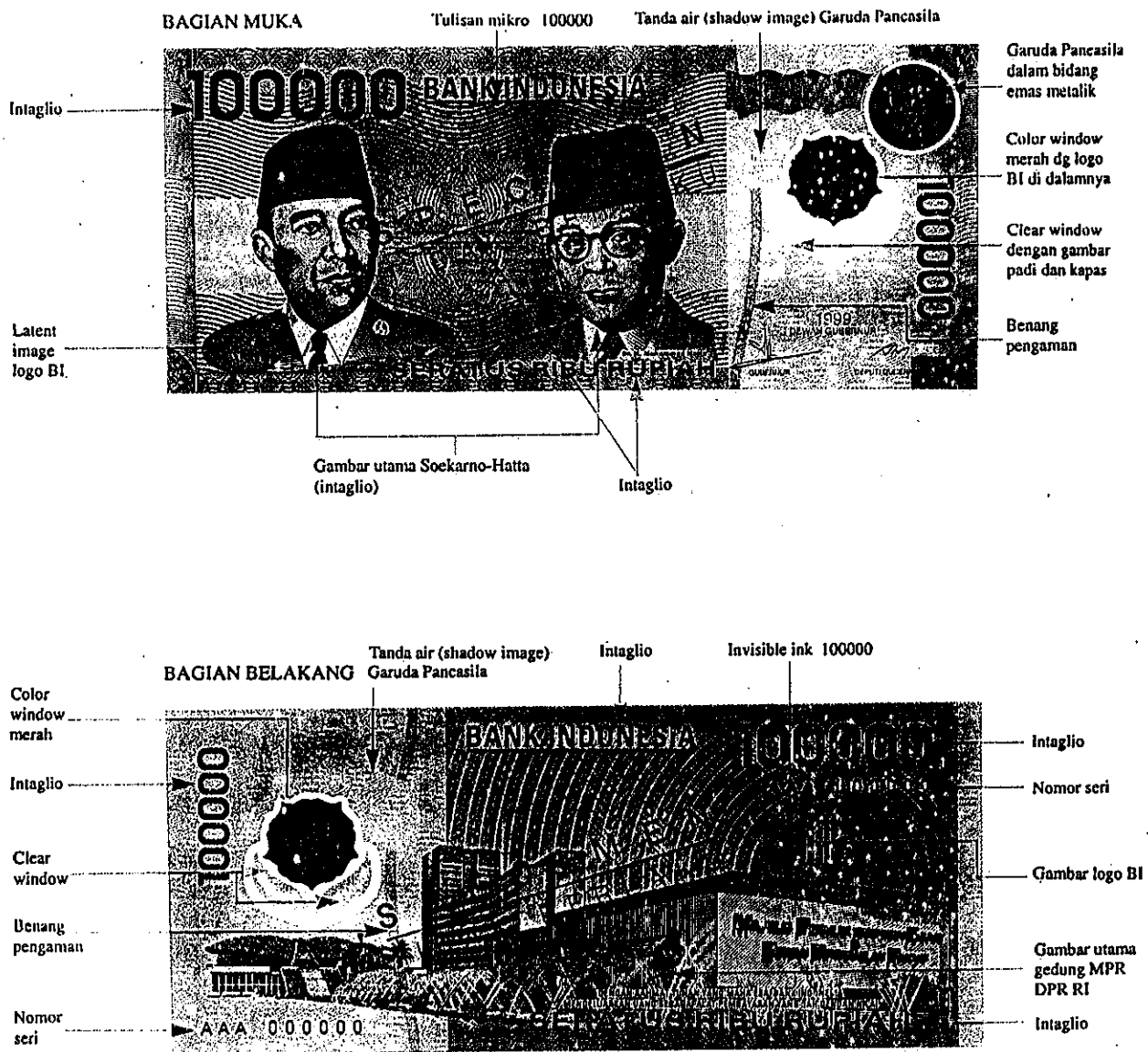
⁶⁴ Ibid hal 6.

CIRI-CIRI UANG PLASTIK PECAHAN Rp 100.000,00 TAHUN EMISI 1999

1.	Ukuran	151 mm x 65 mm
2.	Bahan	Dibuat dari plastik (<i>polymer substrate</i>)
3.	Warna Dominan	Coklat muda dan kuning
4.	Unsur Pengaman	<p>a. Tanda air (<i>shadow image</i>) dengan gambar Garuda Pancasila yang memotong benang pengaman.</p> <p>b. Benang pengaman berbentuk lengkung dengan tulisan mini "BANK INDONESIA 100000" berseling terbalik dan dapat dibaca dari sisi muka dan belakang.</p> <p>c. Plastik transparan berwarna merah (<i>color window</i>) memuat logo BI didalamnya yang terasa kasar apabila diraba. Bila dilipat maka penampakan huruf I pada logo BI diatas Gedung MPR dan DPR menjadi tidak jelas.</p> <p>d. Plastik transparan (<i>clear window</i>) dengan gambar padi dan kapas.</p>
5.	Bagian Muka	<p>a. Gambar utama DR. Ir. Soekarno dan DR. Mohammad Hatta dengan Teks Proklamasi dengan huruf mini.</p> <p>b. Angka "100000" dengan arah horisontal dan vertikal.</p> <p>c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "SERATUS RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar.</p> <p>d. Dibawah tulisan "BANK INDONESIA" terdapat tulisan mikro "100000" yang berulang berbentuk garis lurus.</p> <p>e. Gambar Garuda Pancasila di dalam lingkaran berwarna emas metalik.</p> <p>f. Bayang-bayang logo BI (<i>latent image</i>) di dada sebelah kanan DR. Ir. Soekarno.</p>
6.	Bagian Belakang	<p>a. Gambar utama Gedung MPR dan DPR.</p> <p>b. Angka "100000" dengan arah horisontal dan vertikal.</p> <p>c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "SERATUS RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar.</p> <p>d. Dibawah tulisan "BANK INDONESIA" terdapat tulisan mikro "100000" yang berulang berbentuk garis lurus.</p> <p>e. Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka.</p> <p>f. Gambar logo BI yang apabila dilihat dari <i>color window</i> maka penampakan huruf I pada logo tersebut menjadi tidak jelas (<i>metameric features</i>).</p>
7.	Cetak Timbul	Pada gambar utama, tulisan "BANK INDONESIA", angka nominal, tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", lambang negara Garuda Pancasila dan logo BI pada <i>color window</i> .
8.	Invisible Ink	Terdapat bidang segi empat yang tidak kasat mata memuat angka "100000" yang memendar dibawah sinar ultra violet.

Gambar 2

UANG KERTAS PECAHAN Rp 100.000 TAHUN EMISI 1999

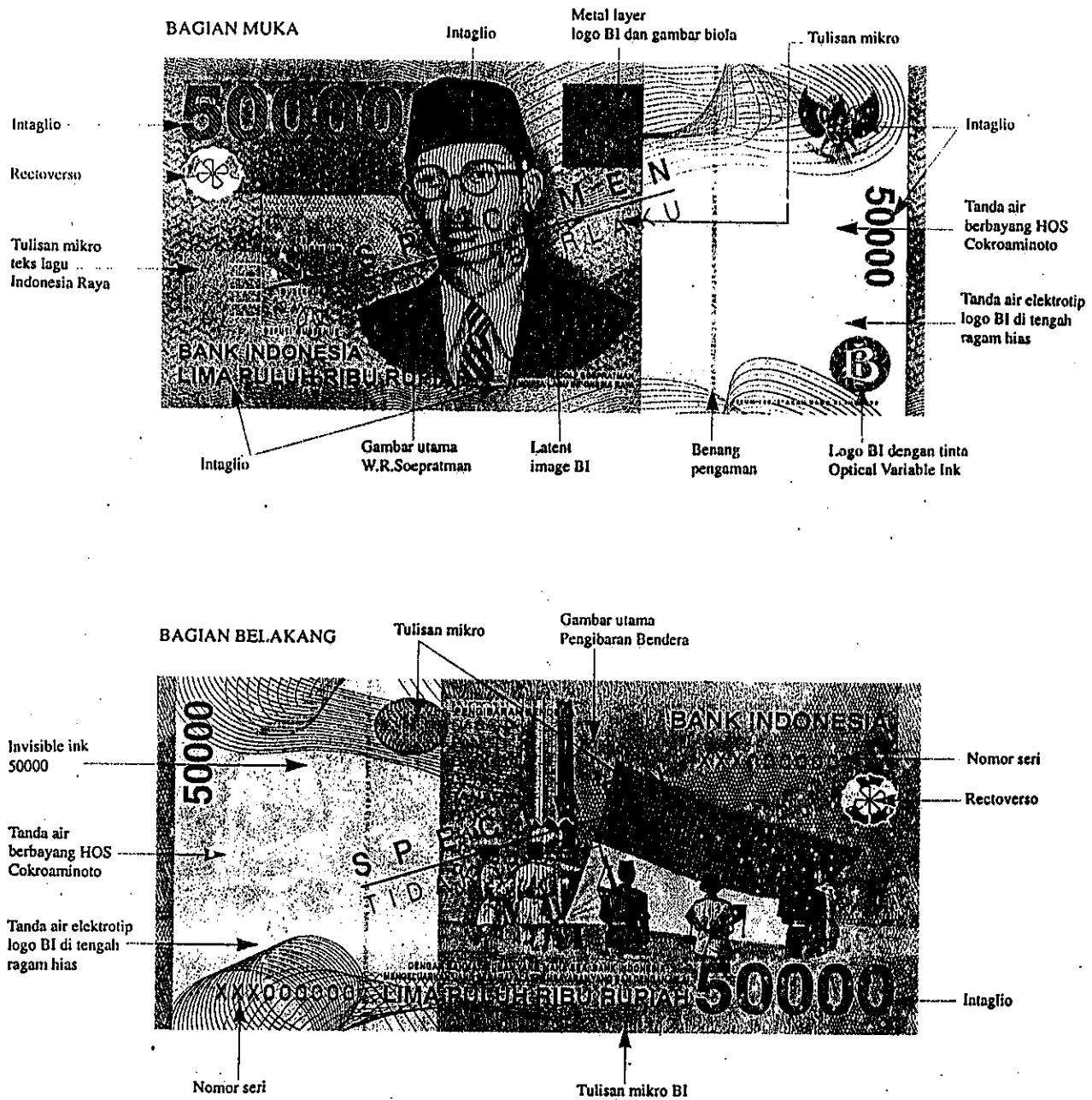


CIRI-CIRI UANG PLASTIK PECAHAN Rp 50.000,00 TAHUN EMISI 1999

1.	Ukuran	152 mm x 72 mm
2.	Warna Dominan	Ungu, hijau muda dan kuning
3.	Tanda Air (Water Mark)	Gambar Pahlawan Nasional H.O.S. Cokroaminoto dan tanda electrotipe berbentuk logo Bank Indonesia ditengah ragam hias berbentuk bunga, nampak apabila diterawangkan ke arah cahaya dan apabila diarsir pada kertas putih yang tipis maka gambar tersebut akan timbul dikertas.
4.	Benang Pengaman	Plastik tembus pandang dengan teks "BANK INDONESIA 50000" berwarna hitam yang dapat dibaca dengan kaca pembesar (<i>Loupe</i>) dan akan memendar merah dibawah sinar lampu Ultra Violet (UV).
5.	Bagian Muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Pahlawan Nasional W.R. Soepratman. b. Angka "50000" dengan arah horisontal dan vertikal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "SERATUS RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BI" berupa teks lagu Indonesia Raya dan tulisan "BANK INDONESIA" di sebelah kanan gambar utama. e. <i>Latent Image</i> dengan tulisan "BI" pada jas sebelah kanan gambar utama. f. Gambar rectoverso berbentuk motif bunga yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya. g. Cetak metal layer memuat logo BI dan gambar biola. h. Gambar logo BI yang dicetak dengan tinta <i>Optical Variable Ink (OVI)</i>.
6.	Bagian Belakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Pengibaran Bendera Merah Putih. b. Angka "50000" dengan arah horisontal dan vertikal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BANK INDONESIA" yang berulang pada bagian warna merah bendera, dan pada bulatan bola dunia. Selain itu tulisan mikro di belakang tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH". e. Gambar rectoverso berbentuk motif bunga yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya. f. Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berwarna merah yang memendar warna kuning dan warna hitam yang warna hijau dibawah sinar ultra violet.
7.	Cetak Timbul	Pada gambar utama, tulisan "BANK INDONESIA", angka nominal, tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", dan perisai pada lambang negara Garuda Pancasila.
8.	Invisible Ink	Terdapat cetakan yang tidak kasat mata memuat cetakan angka "50000" yang memendar kuning kehijau-hijauan dibawah sinar ultra violet dan berada di sebelah kiri atas.

Gambar 3

UANG KERTAS PECAHAN Rp 50.000 TAHUN EMISI 1999



CIRI-CIRI UANG PLASTIK PECAHAN Rp 20.000,00 TAHUN EMISI 1998

1	Ukuran	152 mm x 72 mm
2	Warna Dominan	Hijau
3	Tanda Air (Water Mark)	Gambar Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara, nampak apabila diterawangkan ke arah cahaya dan apabila diarsir pada kertas putih yang tipis maka gambar tersebut akan timbul dikertas. Dibagian dada terdapat tanda air elektrotif berbentuk logo Bank Indonesia di tengah ragam hias.
4	Benang Pengaman	Plastik tembus pandang dengan teks "BANK INDONESIA 20000" berwarna hitam yang dapat dibaca dengan kaca pembesar (<i>Loupe</i>) dan akan memendar merah dibawah sinar lampu Ultra Violet (UV).
5	Bagian Muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara. b. Angka "20000" dengan arah horisontal dan vertikal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "DUA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BANK INDONESIA 20000" yang berulang dan membentuk segi empat di sebelah kanan peci Ki Hajar Dewantara. e. Di bagian bawah terdapat <i>Latent Image</i> berupa angka "20000" di dalam bingkai empat persegi panjang yang utuh. Diatas dan dibawah bingkai terdapat tulisan mikro "BANK INDONESIA 20000" secara berulang. f. Gambar rectoverso berbentuk kontur garis yang diambil dari ragam hias Jawa Tengah yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya. g. Sebelah kanan dekat gambar utama terdapat hiasan nulti layer berwarna abu-abu metalik yang memuat logo Bank Indonesia dan patung Ganesha.
6	Bagian Belakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama kegiatan belajar di Perguruan Taman Siswa. b. Sebelah kiri atas terdapat gambar buku terbuka memuat tulisan mikro "20000" dan "BI" secara berulang. c. Angka "20000" sebagian berwarna hijau dan sebagian berwarna coklat dengan arah vertikal dan arah horisontal. d. Tulisan "BANK INDONESIA" yang dan "DUA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. e. Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berwarna hitam yang memendar kuning kehijau-hijauan dibawah sinar ultra violet dan warna merah yang memendar kuning kemerah-merahan. f. Tulisan teks ketentuan pidana dengan menggunakan huruf besar. g. Gambar rectoverso berbentuk kontur garis yang diambil dari ragam hias Jawa Tengah yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
7	Cetak Timbul	Pada gambar utama, tulisan "BANK INDONESIA", angka nominal, dan tulisan "DUA PULUH RIBU RUPIAH".
8	Invisible Ink	Terdapat bidang segi empat yang tidak kasat mata memuat angka "20000" yang memendar kuning dibawah sinar ultra violet dan berada di sebelah kanan atas.

Gambar 4

UANG KERTAS PECAHAN Rp 20.000 TAHUN EMISI 1998

BAGIAN MUKA

Gambar utama
Ki Hadjar DewantaraTulisan mikro
BANK INDONESIA 20000

Intaglio

Tulisan mikro
BANK
INDONESIA
20000Tanda air
berbayang
Ki Hadjar
DewantaraTanda air
elektrotip
logo BI dan
ragam hiasLatent image
20000

Benang pengaman

Multilayer latent image
Logo BI dan Patung Ganesha

Rectoverso

BAGIAN BELAKANG

Gambar utama
Kegiatan Belajar

Invisible ink

Intaglio

Tulisan mikro
20000 BIBIBITanda air
berbayang
Ki Hadjar
DewantaraTanda air
elektrotip
logo BI dan
ragam hias

Nomor seri

Rectoverso

Benang pengaman

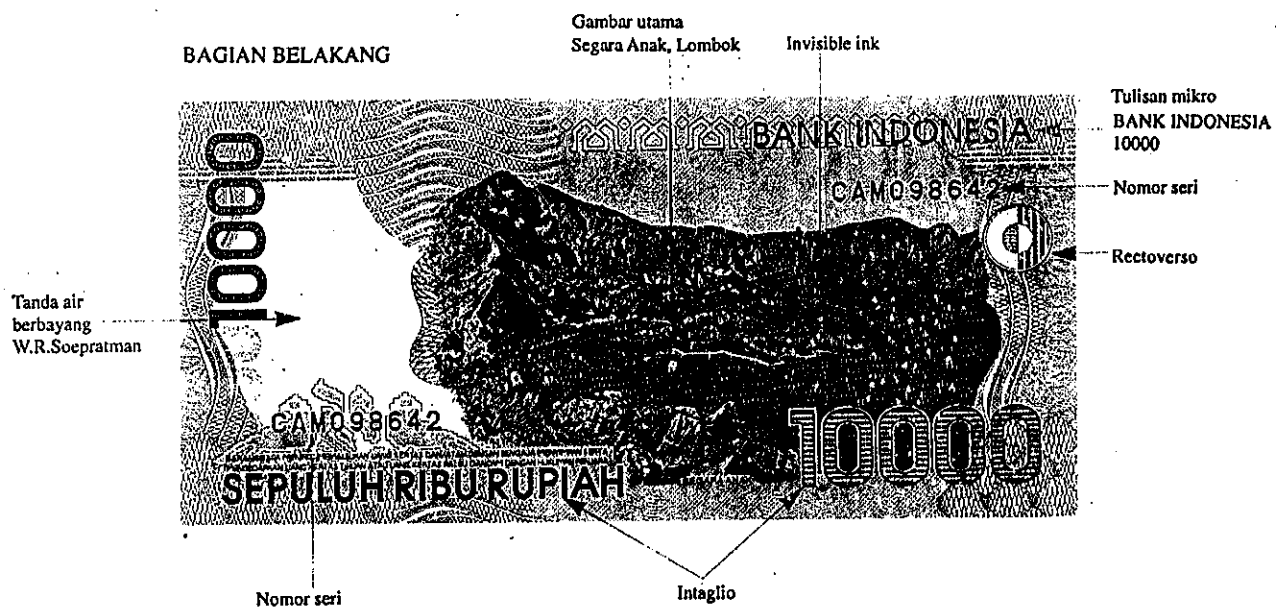


CIRI-CIRI UANG PLASTIK PECAHAN Rp 10.000,00 TAHUN EMISI 1998

1	Ukuran	148 mm x 72 mm
2	Warna Dominan	Ungu dan coklat
3	Tanda Air (Water Mark)	Gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman, nampak apabila diterawangkan ke arah cahaya dan apabila diarsir pada kertas putih yang tipis maka gambar tersebut akan timbul di kertas.
4	Benang Pengaman	Plastik tembus pandang dengan teks "BANK INDONESIA 10000" berwarna hitam yang dapat dibaca dengan kaca pembesar (<i>Loupe</i>) dan akan memendar merah dibawah sinar lampu Ultra Violet (UV).
5	Bagian Muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien. b. Angka "10000" berwarna ungu dengan arah horisontal dan vertikal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "SEPULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BANK INDONESIA 10000" yang berulang dan membentuk lengkungan setengah lingkaran arah vertikal. e. Disamping kiri gambar utama terdapat tulisan "BI" dan "10000" berulang membentuk deretan siku-siku, disusun dalam bulatan kipas sulaman dari Aceh. f. Gambar rectoverso berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat garis tebal vertikal dan garis tipis horisontal, bila diterawangkan ke arah cahaya. g. Sebelah kanan bawah dekat gambar utama terdapat multi layer <i>latent image</i> memuat tulisan "BI".
6	Bagian Belakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Danau Segara Anak, NTB. b. Angka "10000" sebagian berwarna coklat dan sebagian berwarna biru dengan arah vertikal dan arah horisontal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "DUA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BANK INDONESIA" dan "10000". e. Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berwarna hitam yang memendar kuning kehijau-hijauan dibawah sinar ultra violet dan warna merah yang memendar kuning kemerah-merahan. f. Tulisan teks ketentuan pidana dengan menggunakan huruf besar. g. Gambar rectoverso berbentuk kontur garis yang diambil dari ragam hias Jawa Tengah yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
7	Cetak Timbul	Pada gambar utama, tulisan "BANK INDONESIA", angka nominal, tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH", dan perisai pada lambang negara.
8	Invisible Ink	Dibagian belakang dibawah tulisan "BANK INDONESIA" terdapat bidang segi empat yang tidak kasat mata memuat angka "10000" berwarna hitam yang memendar kuning dibawah sinar ultra violet.

Gambar 5

PECAHAN UANG KERTAS Rp 10.000 TAHUN EMISI 1998

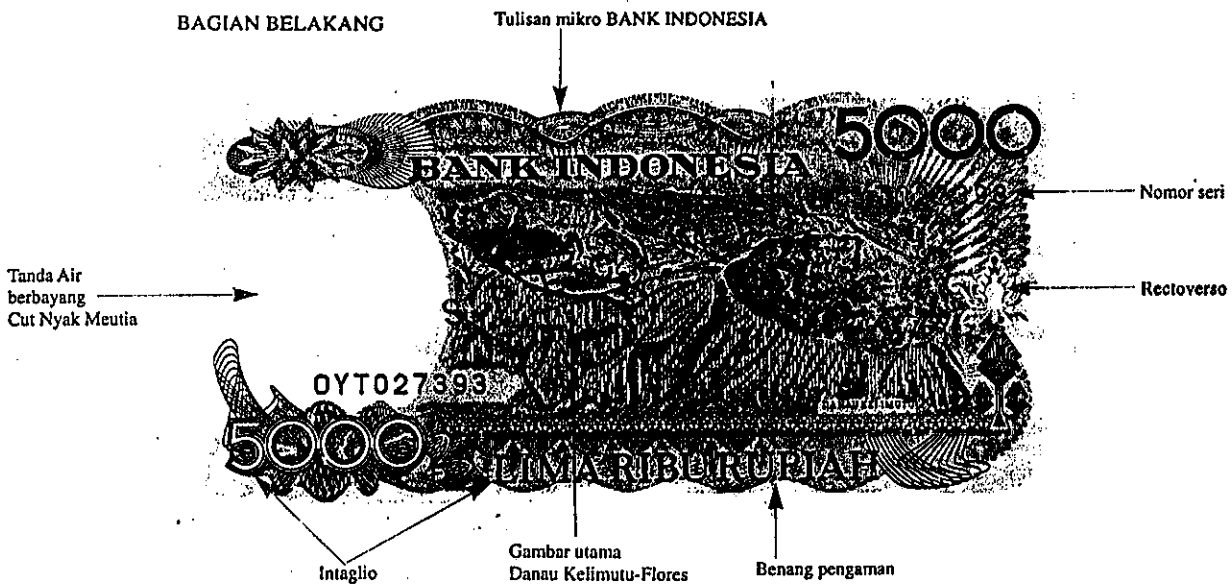
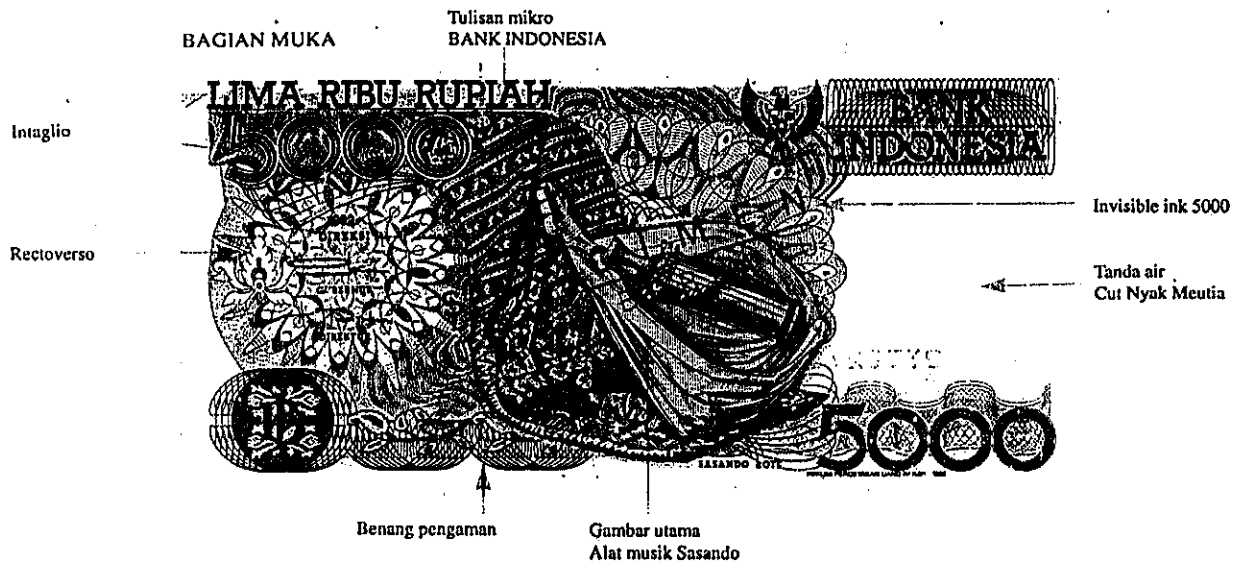


CIRI-CIRI UANG PLASTIK PECAHAN Rp 5.000,00 TAHUN EMISI 1992

1	Ukuran	144 mm x 72 mm
2	Warna Dominan	Coklat
3	Tanda Air (Water Mark)	Gambar Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia, akan nampak apabila diterawangkan ke arah cahaya dan apabila diarsir pada kertas putih yang tipis maka gambar tersebut akan timbul dikertas.
4	Benang Pengaman	Plastik tembus pandang dengan teks "BANK INDONESIA 10000" berwarna hitam yang dapat dibaca dengan kaca pembesar (<i>Loupe</i>) dan akan memendar merah dibawah sinar lampu Ultra Violet (UV).
5	Bagian Muka	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama alat musik tradisional Sasando dari Pulau Rote dengan latar belakang sarung tenun ikat. b. Angka "5000" dengan arah horisontal. c. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "LIMA RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. d. Tulisan mikro "BANK INDONESIA" secara berulang di bagian bawah tulisan "LIMA RIBU RUPIAH". e. Gambar rectoverso berbentuk motif bunga yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
6	Bagian Belakang	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambar utama Danau Kalimutu di Flores. b. Tulisan mikro "BANK INDONESIA" yang berulang terdapat pada motif lengkung berwarna biru di atas tulisan "BANK INDONESIA" c. Angka "5000" dengan arah horisontal. d. Tulisan "BANK INDONESIA" dan "DUA PULUH RIBU RUPIAH" yang ditulis menggunakan huruf besar. e. Nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka berwarna merah yang memendar warna merah kekuningan dan hitam yang akan memendar warna hijau kekuningan dibawah sinar ultra violet. f. Tulisan teks ketentuan pidana dengan menggunakan huruf besar. g. Gambar rectoverso berbentuk motif bunga yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
7	Cetak Timbul	Pada gambar utama, tulisan "BANK INDONESIA", angka nominal, tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH", dan perisai pada lambang negara Garuda Pancasila.
8	Invisible Ink	Terdapat angka "5000" secara horisontal yang memendar hijau dibawah sinar ultra violet terletak di atas gambar Sasando.

Gambar 6

PECAHAN UANG KERTAS Rp 5.000 TAHUN EMISI 1992



D. PEMALSUAN UANG RUPIAH

Saat ini tindak pidana pemalsuan uang rupiah semakin besar yang diakibatkan situasi perekonomian negara yang sedang terpuruk. Dalam keadaan seperti itu semakin banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, disamping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara.

Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah melalui peningkatan koordinasi dengan instansi dalam melakukan penangkapan dan pemrosesan kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

Berdasarkan hasil penemuan hingga saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Lukisan Tangan

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara mengandalkan kepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.

2. *Color Transfer*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut.

3. Cetak Sablon

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.

4. Cetak *Offset*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak *offset* seperti pada pembuatan majalah.

5. Foto kopi berwarna

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin foto kopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin foto kopi berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang.

6. *Scanner*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat *scanner* dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna.

7. *Color Separation*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara teknik cetak fotografi melalui proses pemisahan warna. Warna-warna yang ada pada uang kertas asli diperoleh dari penggabungan 3 warna pokok yaitu *cyan* (biru), *magenta* (merah) dan *yellow* (kuning) serta penggunaan warna *black* (hitam) untuk memperoleh kesempurnaan/kekontrasan hasil cetakan.⁶⁵

⁶⁵ Bank Indonesia, *Metri Penataran Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Jakarta, 2000, hal 9.

E. TINDAK PIDANA UANG PALSU

Di muka sudah dikenalkan mengenai uang palsu yakni hasil pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai mata uang yang sah.

Tindak pidana Uang Palsu ini diatur pada Bab X Buku II KUHP yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 250 Bis, Pasal 251, Pasal 252, kemudian Pasal IX sampai dengan Pasal XIII UU No. 1 Tahun 1946.

Berikut bunyi Pasal-Pasal dan beberapa pandangan/pendapat R. Sugandhi, SH tentang Tindak Pidana Upal dari Pasal-Pasal KUHP dan UU No. 1 Tahun 1946⁶⁶.

Pasal 244

Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

*Penjelasan*⁶⁷

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

– “Meniru” berarti membuat demikian rupa sehingga menyerupai asli.

⁶⁶ R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980, hal 259.

⁶⁷ Penjelasan Pasal adalah pandangan atau pendapat R. Sugandhi, SH, tentang pasal-pasal yang dimaksud, dan bukan merupakan penjelasan resmi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang.

- Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam.
- Uang kertas negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari kertas.
- Uang kertas bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah, terbuat dari kertas.
- Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.

Seorang yang melukis uang kertas negara demikian rapi sehingga sama dengan aslinya, tetapi tidak disertai suatu maksud untuk menjalankannya sebagai uang kertas yang sah, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (lihat pasal 519).

Termasuk "meniru uang" : mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambal dengan logam yang lain, mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi.

Orang yang mengurangi logam mata uang, dikenakan pasal 246.

Pasal 245

Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau yang dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank mengetahui akan kepalsuan atau dipalsukan itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank

yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Ringkasnya yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

- Mengenai “mata uang”, “uang kertas negara”, “uang kertas bank”, “meniru atau memalsu”, lihat penjelasan pasal 244.
- Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, orang mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan itu harus mengetahui akan kepalsuannya. Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui akan kepalsuannya, tidak dihukum.

Pasal 246

Barangsiapa mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan, atau menyuruh mengeluarkan uang yang sudah kurang harganya itu, dipidana karena merusak uang, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan mata uang yang sudah berkurang itu sebagai mata uang yang masih utuh.

- Yang dapat dikurangi harganya ialah mata uang yang terbuat dari logam; uang kertas tidak dapat dikurangi. Dan yang biasa dikurangi ialah mata uang yang terbuat dari emas atau perak.
- Cara mengurangi ialah dengan jalan mengikir mata uang tersebut, sehingga berat timbangannya kurang.
- Perbuatan ini dapat dihukum, apabila dilakukan dengan maksud akan mengedarkan uang yang sudah dikurangi harganya itu sebagai mata uang yang masih utuh.

Pasal 247

Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangkannya sendiri harganya atau yang kerusakannya diketahuinya waktu diterimanya sebagai yang tidak rusak, atau

barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang itu ke daerah Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangi sendiri harganya, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang yang telah dikurangi harganya itu mengetahui bahwa mata uang itu telah rusak, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh untuk mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dirusak, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Ringkasnya, seperti juga pasal 245, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dikurangi harganya, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

- Mengenai mata uang yang telah dikurangi harganya, lihat penjelasan pasal 246.
- Mengedarkannya harus dengan unsur sengaja dan mengetahui bahwa mata uang itu telah dikurangi harganya.

Pasal 249

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 242 dan 247, maka barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau yang dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menerima mata uang palsu, dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan tidak mengetahui kepalsuan uang tersebut, kemudian setelah ia

mengetahui bahwa uang itu palsu mengedarkannya kembali sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang tidak palsu atau dipalsukan, karena ia tidak mau rugi.

Orang yang membeli sesuatu dengan uang palsu tetapi tidak diketahui bahwa uang itu palsu, tidak dapat dihukum.

Pasal 250

Barangsiapa membuat atau menyediakan bahan atau barang yang diketahuinya bahwa itu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi harga mata uang, atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membuat atau menyediakan perkakas-perkakas atau bahan-bahan seperti : cap cetakan, kertas, logam, mesin percetakan, klise, obat-obatan kimia, potret dan sebagainya yang diketahui bahwa perkakas-perkakas atau bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, mengurangi harga mata uang.

Pasal 250 bis

Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini, maka :

Mata uang yang palsu, dipalsukan atau dirusakkan itu, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, bahan atau barang-barang yang menilik sifatnya disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi harga mata uang atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank itu, sekedar dengan itu dikerjakan kejahatan itu, atau barang-barang itu menjadi pokok kejahatan itu, dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Penjelasan

Peraturan umum tentang barang-barang yang boleh dirampas termaktub dalam pasal 39.

Tetapi peraturan yang termaktub dalam pasal ini, merupakan peraturan khusus.

Menurut pasal ini, maka barang-barang tersebut tidak hanya boleh dirampas (fakultatif), tetapi harus dirampas (imperatif). Kalau pasal 39 menetapkan bahwa barang yang boleh dirampas itu harus milik

tersangka, maka dalam pasal 250 bis ini menetapkan bahwa semua barang yang menjadi pangkal kejahatan harus dirampas, sekalipun bukan milik tersangka.

Pasal 251

Barangsiapa dengan sengaja dan tidak dengan mendapat izin dari Kepala Pemerintah Daerah, menyediakan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia keping-keping perak atau papan-papan perak yang bercap atau tidak, dan sesudah dicap, diulang capnya atau sesudah diusahakan orang dapat dipandang mata uang, dan yang nyata tidak untuk perhiasan atau tanda peringatan, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah.

Penjelasan

Maksud pasal ini ialah untuk mencegah supaya jangan sampai ada barang-barang yang diedarkan di Indonesia yang menyerupai mata uang. Guna mengawasi hal itu, maka memasukkan benda-benda semacam itu ke Indonesia harus ada izin dari yang berwajib. Dan untuk benda-benda yang nyata-nyata sebagai perhiasan atau tanda peringatan (misalnya dalam bentuk kalung, gelang dan sebagainya), tidak diperlukan izin.

Pasal 252

Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247 itu, pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Penjelasan

Hak yang dicabut menurut pasal ini adalah ialah :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Masuk menjadi A.B.R.I
3. Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum.
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

Pasal IX sampai dengan XIII di bawah ini ditambahkan dengan U.U. No. 1/1946.

Pasal IX

Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh

menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal X

Barangsiapa dengan sengaja menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal XI

Barangsiapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal XII

Barangsiapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau menyimpan atau mengangkut mata uang kertas, sedang ia mengetahui bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal XIII

Kalau orang dipidana karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-pasal IX, X, XI, XII, maka mata uang atau uang kertasnya serta benda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terpidana.⁶⁸

⁶⁸ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, *Usaha Nasional*, Surabaya, Juli 1980, hal 259 – 267.

F. KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN SOSIAL

1. Peristilahan dan Pengertian Kebijakan Sosial

Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* yang sering juga diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Terlepas dari perbedaan tersebut, *policy* menurut **Harold D. Lasswell** dan **Abraham Kaplan** diartikan sebagai *a projected program of goals, values, and practices* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek terarah. Sedang **Carl J. Frederick** mengartikan *policy* sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶⁹ Pandangan lain dikemukakan oleh **James E. Anderson** yang menyatakan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by actor or set of actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Sehubungan dengan pengertian kebijakan tersebut, maka kebijakan negara (*public policy*) diartikan sebagai berikut :

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bina Cipta Bandung, 1998, hal 23.

A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actor concerning the selection of goals and means of achieving them within the power of these actors to achieve (serangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut).⁷⁰

Dalam membuat kebijakan dari suatu kebijakan negara, dikenal ada 3 teori atau model pengambilan keputusan dilihat dari hasil atau efek antara lain :⁷¹

a. Teori Rasional Komprehensif

Teori ini menekankan pada pengambilan keputusan yang rasional berdasarkan pada informasi yang komprehensif dan keahlian pembuatan keputusan. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pendekatan cara dan tujuan, yaitu dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.

b. Teori Inkremental

Teori inkremental merupakan kritik atas teori rasional komprehensif yang dipandang terlalu ideal. Teori ini memandang kebijakan negara sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya dan pembuatan kebijakan bersifat modifikasi dan ketidaksempurnaan kebijakan yang ada sebelumnya. Kebijakan

⁷⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal 13.

⁷¹ M. Irfan Islamu, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 15-17.

sebelumnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang baru dengan didasarkan hasil evaluasi dan realita.

c. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas dengan mengambil unsur-unsur yang baiknya. Model rasional komprehensif dan inkremental akan nampak kegunaannya kalau dipandang sebagai suatu kontinum dalam proses pembuatan keputusan.

Nilai-nilai menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan menurut **Anderson** dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu (1) nilai-nilai politik; (2) nilai-nilai organisasi; (3) nilai-nilai pribadi; (4) nilai-nilai kebijakan; (5) nilai-nilai ideologi.⁷²

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya masalah kebijakan (publik) merupakan proses politik dan salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan dibidang hukum (termasuk hukum pidana). Misalnya pembentukan UU, yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR baik atas usul Pemerintah maupun DPR (Pasal 5, 20 dan 21 UUD 1945 Amandemen Pertama. Berkaitan dengan hal ini **James Levin** dkk. Menyatakan :⁷³

The policy-making activity that often gets the most public attention is the creation and readjustment of criminal codes. These codes are legislative definitions of criminal behavior and prescriptions of punishment for different categories of criminal behavior. Crime is any act that lawmakers designate as "court-punishable behavior".

⁷² Solichin Abdul Wahab, Ibid hal 14.

⁷³ James Levin, at. Al., *Criminal Justice A Public Policy Approach*, Harcourt Brace Javanovich, New York, 1980, hal 63-64.

2. Kebijakan Kriminal sebagai Bagian dari Kebijakan Sosial

Suatu komunitas manusia dalam masyarakat baik kecil maupun besar pada dasarnya selalu mengharapkan tercapainya kehidupan yang lebih baik, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu manusia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan atau keinginannya itu.

Dalam suatu negara, kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya berada pada anggota masyarakat tetapi terutama berada pada pemerintah yang merencanakan dan mengambil kebijakan. Pemerintah melalui kebijakannya berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan lembaga pemerintahan yang bisa berjalan efektif harus memenuhi sekurang-kurangnya empat hal sebagai berikut :

a. Lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan badan-badan lain yang berada diluarnya.

b. Kedudukan lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolitis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian.

- c. Peranan lembaga tersebut harus sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu seolah-olah terikat kepada lembaga tersebut, sementara keputusannya mengikat kelompok tersebut beserta dengan anggota-anggotanya.
- d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis, dalam arti setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan tertentu diambil.⁷⁴

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dilakukan melalui pembangunan yang didasarkan pada hukum yang memberikan arah dan rambu-rambunya. Dalam hal ini menurut **Mochtar Kusumaatmadja** hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁷⁵

Pembangunan dalam bidang hukum sebagai sub sistem dari pembangunan seluruhnya juga harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum baik materi hukum, struktur hukum, aparatatur hukum budaya hukum dan sarana prasarana diperlukan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat.

⁷⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal 30 – 31.

⁷⁵ Roscoe Pound menyebutnya *law as a tool of social engineering*. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, halaman 11-12; juga I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1999, halaman 17. Hukum disamping berfungsi untuk perlindungan dan keadilan juga sebagai alat pembangunan dan alat kontrol sosial; Menurut William Chambliss dan Albert Seidman: *The use of law as a tool of social engineering implies the use of rules articulated by lawmakers affect the role performance of citizens and official*, dalam *Law, Order and Power*, Addison Wesley Publishing, Philippines, 1971, hal 12.

Paul Scoltren, menunjukkan kekuatan hukum cenderung berada pada dua kutub yakni mementingkan kekuasaan negara untuk kepentingan umum secara ekstrim hukum akan menjadi perangkat kekuasaan yang menjurus diktator, dan jika mementingkan kebebasan individu secara ekstrim akan menjurus kepada keadaan *anarchy* dengan menghapuskan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh kekuasaan⁷⁶. Namun dalam globalisasi pembangunan dalam bidang hukum tidak bisa mengabaikan perkembangan dalam dunia internasional. Oleh karena itu menurut **Soenarjati Hartono** dalam pembentukan sistem hukum nasional harus diperhatikan keserasian antara falsafah dan kebutuhan negara, bangsa dan masyarakat dengan norma-norma hukum internasional yang diakui sah oleh bangsa-bangsa di dunia.⁷⁷

Sehubungan dengan fungsi dari hukum tersebut, maka hukum disamping harus dapat membentuk perilaku masyarakat menjadi baik juga dapat menanggulangi berbagai tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat sebagai sisi negatif dari suatu perubahan. Oleh karena itu negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mampu untuk membentuk dan melaksanakan hukum sesuai dengan fungsinya. Dalam kaitan ini **Lawrence Friedman** menyatakan :⁷⁸

⁷⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 169.

⁷⁷ Sunarjati Hartono, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme)* dalam PJP II, Majalah Padjadjaran, Nomor I, Bandung, 1955, hal 44.

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the welfare State*, dalam Gunther Tuebner, ed., *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin, 1986, hal 13.

The state, in other words, is a giant machine for making and applying law. It is a giant machine of social control, but social control which is exercised through law.

Sisi lain hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep "penyimpangan" dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari "penyimpangan sosial" dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau "biasa" di masyarakat, dan terhadap "tindakan penyimpangan" tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai "berbeda" dan "jahat". Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang pada masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan tersebut tidak begitu jelas, sehingga pada akhirnya banyak sekali tergantung dari sikap Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mengambil keputusan.⁷⁹

Pengambilan keputusan menurut **Parsons** adalah dipengaruhi oleh pelbagai kendala baik yang bersifat normatif maupun situasional.⁸⁰

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, dalam literatur hukum pidana tersebut kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*). Dengan mengacu pada definisi *Marc Ancel* menurut **Sudarto** kebijakan kriminal diartikan sebagai upaya

⁷⁹ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 9.

⁸⁰ Soeryono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta, 1988, Rajawali Perss, hal 36.

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸¹ **Marc Ancel** sendiri merumuskan sendiri sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Sedangkan menurut **Hoefnagels** : *criminal policy is the rational of the social reaction to crime*.⁸²

Kebijakan kriminal tersebut harus dilihat dalam upaya perlindungan masyarakat (*social defense planning*) dan merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa sebagai kebijakan sosialnya (*social policy*), yang dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal, termasuk pembentukan opini masyarakat dan sosialisasi hukum melalui media massa. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Hoefnagels menyatakan :⁸³

Criminal policy as a science of policy is part of larger policy : the law enforcement policy. This make it understandable that the administrative and civil law occupy the same place in the diagram as non-criminal legal crime prevention.
.... The legislative and enforcement policy is turn part of social policy.

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal, kebijakan penegak hukum dan kebijakan sosial dapat digambarkan dengan Bagan 2 dan Bagan 3, sebagai berikut :

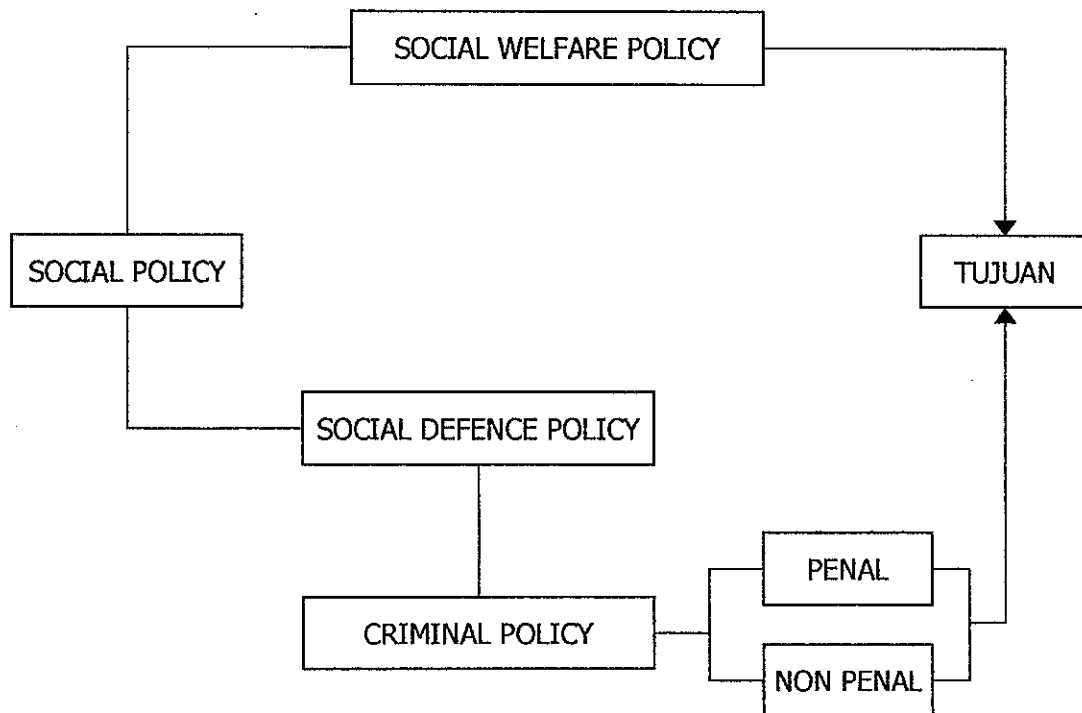
⁸¹ W. Friedman, Ibid hal 150.

⁸² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1972, hal 57.

⁸³ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 8.

Bagan 2

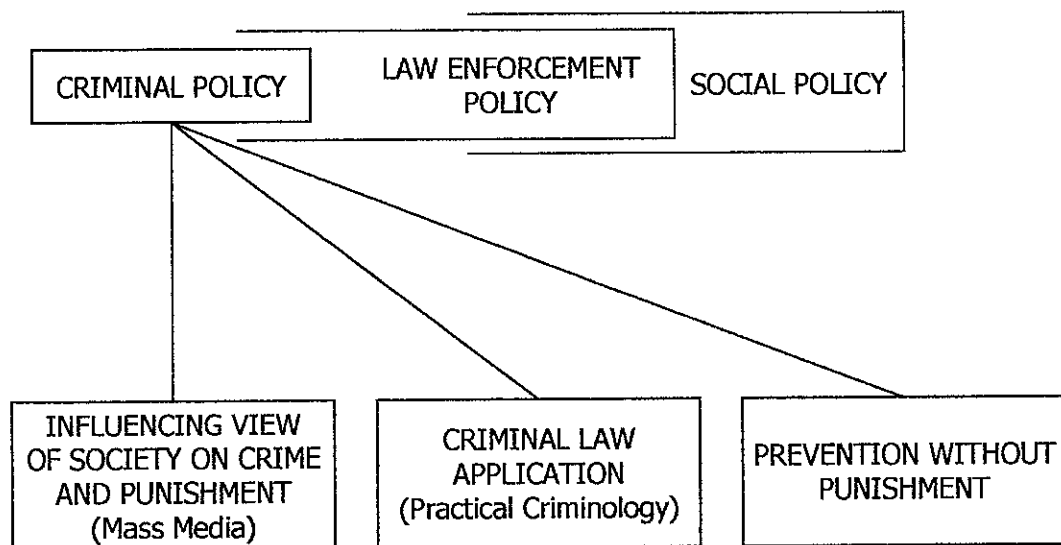
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KEBIJAKAN SOSIAL



(seperti Bagan 1 Hal 14)

Bagan 3

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KRIMINAL, KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN SOSIAL



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offender* juga ditegaskan mengenai perlunya kebijakan kriminal sosial dan perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dirumuskan dalam Kongres antara lain :⁸⁴

1. Kongres PBB ke-4 tahun 1970 di Kyoto Jepang dalam membahas masalah *social defense politics in relation development planning* menyatakan :

Social defense planning should be an integral part of national planning

The prevention of crime and the treatment of offenders cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trends. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriate investment in development programmes.

2. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Geneva dalam membahas masalah *criminal legislation, judicial procedures and other forms of social control in the prevention of crime* menyatakan :

The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country.

3. Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 menyatakan :

⁸⁴ G. Peter Hoefnagels, Ibid hal 57.

Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order (Deklarasi No. 2).

It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on social, cultural, political, and that member states should develop and effective capacity policy, coordinated with strategies for social, economic, political and cultural development (Deklarasi No. 3).

4. Dalam salah satu pertimbangan *Milan Plan of Action* yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 tahun 1985 dinyatakan :

Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be fully responsive to the diversity of political, economic and social systems and to be the constantly evolving condition society (Pertimbangan 4).

Berdasarkan konsepsi kebijakan yang integral tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penegakan hukum pidana) yang merupakan bagian kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana dan Oleh karena itu juga memerlukan sarana lain yang bersifat nonpenal, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan upaya-upaya non penal lainnya yang lebih luas dalam rangka menghilangkan kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga harus didukung dengan kebijakan sosial yang tidak menimbulkan

faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa masalah kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana saja tetapi pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Lebih jauh Hoefnagels menyatakan.⁸⁵

The big problems of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society The big problems of crime and punishment exist in actual fact before criminal law is of possible responses that may be selected. In general we wish to prevent crime. A sound social policy, social planning, housing policy, social legislation, welfare policy, (dari pen.) will be able to produce a wider preventive effect that the administration of justice could ever hope to achieve. In order to achieve effective prevention we must determine the special underlying factors conducive to violation of the norm.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut **Hoefnagels** masalah utama dari kejahatan dan pemidanaan tidak berada dalam hukum pidana tetapi berada dalam realitas masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa masalah pokok dari hukum pidana terletak di luar hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat dan terkait dengan konsep nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa atau negara.⁸⁶

⁸⁵ G. Peter Hoefnagels, Ibid hal 47.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Ibid hal 111.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana disamping menggunakan hukum pidana juga menggunakan upaya-upaya nonpenal lainnya, seperti hukum administrasi dan hukum perdata. Penerapan hukum pidana hanya merupakan salah satu respon yang dapat dipilih untuk mencegah kejahatan, efek pencegahan yang lebih luas justru dihasilkan oleh upaya-upaya nonpenal.

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana juga terkandung keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana upaya-upaya lainnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana tersebut dilihat baik dari hakikat terjadinya tindak pidana maupun berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana (sanksi pidana). Berkaitan dengan hal ini menurut **Sudarto** penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*karieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁸⁷ Lebih jauh **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa sanksi (hukum) pidana bukan merupakan obat untuk mengatasi sebab-sebab kejahatan (pengobatan kausatif) tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari kejahatan tersebut (pengobatan simptomatik) dan pemindahan hanya bersifat/berfungsi individual/personal bukan struktural/fungsional.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 45.

Walaupun demikian hukum pidana sebagai salah satu sistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana tersebut berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut **Sudarto** *penal policy* adalah upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁸ Sedangkan menurut **Mulder** politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana yang dilaksanakan.

Selanjutnya menurut **Barda Nawawi Arief** dengan berdasar pada kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.⁸⁹

Berkaitan dengan perlunya penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, menurut **Roeslan** saleh penggunaan hukum pidana tetap diperlukan karena adanya upaya-upaya perbaikan terhadap terpidana yang tidak mempunyai arti sama sekali,

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 28.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 21.

sedangkan reaksi terhadap pelanggaran norma yang terjadi tetap diperlukan. Reaksi tersebut dapat diberikan oleh hukum pidana sesuai dengan tujuan dan fungsinya melalui pidana dan tindakan.

Selanjutnya mengenai hal ini **Van Bemmelen** berpendapat :⁹⁰

Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, akan tetapi dari sudut ketentuan perintah dan larangan dan untuk menegakkan peraturan (penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin ditrima oleh masyarakat.....

Oleh karena itu selalu perlu ada ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan tersebut yang tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada ditengah individu....

Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan sama sekali ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana.

Pandangan lainnya berkaitan dengan hal tersebut

dikemukakan oleh **Herbert L. Packer** sebagai berikut :⁹¹

The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.

The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harm and treats of harm

The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.

⁹⁰ Tujuan pemindahan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat. Resosialisasi terpidana dengan mengadakan pembinaan keluarga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta dibebaskan rasa bersalah pada terpidana (Konsep KUHP). Bandingkan dengan Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief, Ibid hal 39-40.

⁹¹ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, University Press, California, 1968, hal 364-366.

Berdasarkan pandangan di atas maka hukum pidana walaupun mempunyai batasan-batasan namun tetap diperlukan dalam upaya untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya untuk menghindari efek negatif dari hukum pidana, kegunaannya harus hemat-cermat, hati-hati, selektif, limitatif dan manusiawi.

Hal ini juga berkaitan dengan sifat subsider dari hukum pidana, walaupun untuk menangani tindak pidana yang mengancam sendi-sendi ekonomi negara dapat saja digunakan secara lebih fungsional atau sebagai *remum remedium*.⁹²

Sehubungan dengan hal tersebut **Nigel Walker** mensyaratkan 6 prinsip (*limiting principles*) dalam penggunaan hukum pidana, yaitu :

- a. Hukum pidana tidak digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan.
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
- c. Hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih damai.
- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemindahan harus lebih kecil dari pada akibat tindak pidana.
- e. Harus mendapat dukungan masyarakat.
- f. Harus dapat diterapkan dengan efektif.

Walaupun prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Walker tersebut bukan suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan dalam kebijakan hukum pidana, namun hal tersebut mengingatkan perlunya sikap hati-hati dan selektif dalam penggunaan hukum pidana. Dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai saran untuk

⁹² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Masa Datang*, Ibid hal 7 dan 28.

menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, agar hukum pidana dapat bekerja dengan baik.

Untuk itu dalam melakukan kriminalisasi menurut **Sudarto** harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁹³

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindak penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.
- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian terhadap warga masyarakat.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principles*).
- d. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Op Cit hal 111.

Untuk itu sesuai dengan pendekatan kebijakan yang digunakan, para pengambilan kebijakan harus memperhatikan.⁹⁴

- a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya.
- b. Pilih-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia.
- c. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap alternatif kebijakan.
- d. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Perlunya memperhatikan hal-hal di atas untuk menghindari adanya suatu kebijakan hukum pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagai sarana penanggulangan kejahatan atau perlindungan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka dapat menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*) dalam arti melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasi, dan krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*) dalam arti pengendalian tindak pidana dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.⁹⁵

Dalam era globalisasi, peranan hukum pidana dalam melindungi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara (bukan

⁹⁴ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994, Op Cit hal 10.

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Op Cit hal 157.

dalam arti teritorial), semakin besarnya pengaruh dunia internasional serta semakin berkembangnya bentuk dan dimensi kejahatan. Perkembangan kejahatan tersebut mendapat perhatian serius dalam Kongres PBB tentang *The of Crime and Treatment of Offender* dari Kongres yang ke lima. Dalam Kongres PBB IX tahun 1955 di Cairo, Mesir misalnya, pada bagian Rekomendasi Dokumen A/CONF.169/1.18 dinyatakan :

The by the increasing dimension and sophistication of organized transnational crime worldwide, particular the expansion of criminal activities such as illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, economic crime (garis bawah dari pen), violent activities in urban areas, alien smuggling, money laundering, computer crime and the infiltration of legitimate economies by organized criminal groups, and the effects of those activities on society.

Dari rekomendasi tersebut salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana Uang Palsu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN LEGISLATIF (Formulatif) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU (IUS CONSTITUTUM)

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif.⁹⁶

Menurut **Colin Howard** lembaga pembuat Undang-Undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hal pemidanaan peranan legislatif meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana tetapi juga mengenai jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu⁹⁷.

Kontrol terhadap sah tidaknya tindakan Pemerintah oleh badan-badan peradilan di dalam Sistem Hukum Anglo Saxon disebut "Judicial Review" yang semata-mata mendasarkan pada penilaian bagi aspek legalitas dari suatu tindakan Pemerintah⁹⁸.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, Ibid hal III.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 61, 126.

⁹⁸ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal 13-14.

Kebijakan legislatif di bidang Uang Palsu, termasuk kebijakan legislatif hukum pidana, dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Bahwa pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi.
- b. Dengan pemalsuan uang dapat mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri, serta menimbulkan kerusakan masyarakat.
- c. Masyarakat adalah pihak yang paling menderita akibat pemalsuan uang, karena diantara mereka adalah golongan menengah ke bawah dengan segala keterbatasannya.⁹⁹

Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu ada beberapa Ketentuan Pidana pada mekanisme Penyidikan Uang Palsu oleh Polri sebagai landasan atau dasar penanganannya, antara lain :

- a. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana LN. 1981 No. 79 dan LN. No. 3209.¹⁰⁰
- b. UU No. 6 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu Protokol (*International Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency and Protocol Geneva 1929*).
- c. INPRES RI No. 1/1971 Tentang Pembentukan BOTAS-UPAL.

⁹⁹ BI, Materi Penyuluhan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah, Semarang Oktober 2001.

¹⁰⁰ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya – Indonesia.

- d. UU NO. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Central Pembaharuan dari UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Central LNRI Tahun 1968 No. 63 Tambahan LNRI No. 2865.
- e. KUHP Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 250, Pasal 250 Bis, Pasal 251, Pasal 252.
- f. UU No. 1 Tahun 1946 Pasal IX, X, XI, XII.
- g. JUKNIS KAPOLRI No. Pol : JUKNIS/20/VIII/1991 Tentang Tata Cara Penanganan Barang Bukti Uang Palsu.
- h. JUKNIS/21/VIII/1991 Tentang Sistem Laporan Kasus Uang Palsu.
- i. JUKNIS/25/VIII/1991 Tentang Penyidikan dan Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu yang telah diperbaharui dengan Petunjuk Lapangan/Juklap No. Pol : Juklap/72/III/1993, tanggal 1 Pebruari 1993 tentang Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Bagi satuan Reserse Polri.¹⁰¹

Berdasarkan diskripsi Tindak Pidana di bidang Uang Palsu tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, berkaitan dengan kebijakan legislatif, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab X Buku II Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 250 bis, Pasal 251, Pasal 252, Pasal IX sampai dengan Pasal XIII UU No. 1 Tahun 1946.

¹⁰¹ Mabes Polri, Mekanisme Penyidikan Uang Palsu, Jakarta 2000, hal 6.

Yang paling mengena pada Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah Pasal 244, sedangkan pasal-pasal lain dalam Bab X Buku II adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan Pemalsuan Uang.

Pasal 244

Dinyatakan dalam pasal ini, bahwa yang diancam dalam pasal ini :

Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

- “Meniru” berarti membuat demikian rupa sehingga menyerupai asli.
- Mata uang negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam.
- Uang kertas negara, ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari kertas.
- Uang kertas bank, ialah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, terbuat dari kertas.
- Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.

Seorang yang melukis uang kertas negara demikian rapi sehingga sama dengan aslinya, tetapi tidak disertai suatu maksud untuk menjalankannya sebagai uang kertas yang sah, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (lihat pasal 519).

Termasuk “meniru uang” : mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambahi dengan logam yang lain, mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi.

Orang yang mengurangi logam mata uang, dikenakan Pasal 246.

Dinyatakan bahwa seorang pelukis yang mampu melukis, sama seperti aslinya jika tidak ada maksud untuk menjalankan tidak dapat dituntut ketentuan ini seperti Pasal 519 KUHP

Pasal 519 KUHP

- (1) Barangsiapa membuat, menjual atau menyiarkan atau menyediakan untuk dijual atau disiarkan ataupun memasukkan ke Indonesia : barang cetakan, potongan logam atau benda lain, yang rupanya mirip dengan uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mata uang, barang emas atau perak yang memakai cap negara atau materai pos, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Benda yang menjadi sebab pelanggaran itu boleh dirampas.

Penjelasan

Ancaman hukuman terhadap pelanggaran yang diterangkan dalam pasal ini tidak demikian berat sebagaimana ancaman hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 dan 249.

Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh percetakan atau toko-toko yang mencetak atau menyebarkan barang-barang cetakan yang menyerupai uang kertas negara, uang kertas bank, mata uang atau perangko sebagai reklame atau tukang emas yang menjual perhiasan seperti tusuk konde, kancing baju dan sebagainya yang menyerupai mata uang. Dalam pengertian "mata uang" termasuk juga mata uang asing.¹⁰²

Pasal 245

Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau yang dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

¹⁰² R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasmnya, Ibid halaman 525.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank mengetahui akan kepalsuan atau dipalsukan itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Ringkasnya yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

- Mengenai “mata uang”, “uang kertas negara”, “uang kertas bank”, “meniru atau memalsu”, lihat penjelasan pasal 244.
- Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, orang mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan itu harus mengetahui akan kepalsuannya. Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui akan kepalsuannya, tidak dihukum¹⁰³.

Sedangkan pada Pasal 246 KUHP lebih pada Perusakan

Uang, perhatikan dengan seksama bunyi Pasal 246 KUHP :

¹⁰³ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Op Cit hal 360.

Pasal 246

Barangsiapa mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan, atau menyuruh mengeluarkan uang yang sudah kurang harganya itu, dipidana karena merusak uang, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan mata uang yang sudah berkurang itu sebagai mata uang yang masih utuh.

- Yang dapat dikurangi harganya ialah mata uang yang terbuat dari logam; uang kertas tidak dapat dikurangi. Dan yang biasa dikurangi ialah mata uang yang terbuat dari emas atau perak.
- Cara mengurangi ialah dengan jalan mengikir mata uang tersebut, sehingga berat timbangannya kurang.
- Perbuatan ini dapat dihukum, apabila dilakukan dengan maksud akan mengedarkan uang yang sudah dikurangi harganya itu sebagai mata uang yang masih utuh.

Pasal 247

Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangkannya sendiri harganya atau yang kerusakannya diketahuinya waktu diterimanya sebagai yang tidak rusak, atau barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang itu ke daerah Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangi sendiri harganya, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang yang telah dikurangi harganya itu mengetahui bahwa mata uang itu telah rusak, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh untuk mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dirusak, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Ringkasnya, seperti juga pasal 245, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dikurangi harganya, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

- Mengenai mata uang yang telah dikurangi harganya, lihat penjelasan pasal 246.
- Mengedarkannya harus dengan unsur sengaja dan mengetahui bahwa mata uang itu telah dikurangi harganya.

Pasal 249

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 245 dan 247, maka barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau yang dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menerima mata uang palsu, dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan tidak mengetahui kepalsuan uang tersebut, kemudian setelah ia mengetahui bahwa uang itu palsu mengedarkannya kembali sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang tidak palsu atau dipalsukan, karena ia tidak mau rugi.

Orang yang membeli sesuatu dengan uang palsu tetapi tidak diketahui bahwa uang itu palsu, tidak dapat dihukum.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 245 KUHP :

Pasal 245

Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya

atau yang dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Penjelasan

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
2. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank mengetahui akan kepalsuan atau dipalsukan itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan.
3. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Pasal 249

Mengeluarkan mata uang yang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau yang dipalsukan diancam dengan pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 249 KUHP) adalah pasal yang berhubungan dengan Pemalsuan Uang.

Pasal 250

Pasal ini mengena dan ada kaitannya dengan Tindak Pidana Uang Palsu yang berkaitan dengan membuat atau penyediaan bahan atau barang yang diketahuinya bahwa itu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi harga mata uang atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank.

Pasal 250 Bis

Pasal ini antara lain menerangkan bahwa semua barang yang menjadi pangkal kejahatan harus dirampas sekalipun bukan milik tersangka.

Pasal 251

Pasal ini lebih pada perijinan mengenai masuknya keping-keping perak atau papan-papan perak ke Pemerintah, yang harus ada ijin Kepala Pemerintah Daerah dan jika ternyata keping-keping tadi di cap dan menyerupai mata uang dan dipakainya sebagai mata uang yang asli dipidana, hal ini dikandung maksud untuk mencegah supaya jangan sampai ada barang-barang yang diedarkan di Indonesia yang menyerupai mata uang.

Pasal 252

Hal yang dibahas dalam pasal ini lebih pada akibat pemalsuan uang, maka hak-hak orang yang melakukan Tindak Pidana dicabut Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Ke-1 menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;

Ke-2 menjadi militer;

Ke-3 memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;

Ke-4 menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;

Penjelasan Pasal 252

Hak yang dicabut menurut pasal ini adalah ialah :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Masuk menjadi A.B.R.I
3. Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum.
4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

Disamping pasal-pasal yang mengatur tindak pidana uang palsu pada KUHP, tindak pidana uang palsu juga diatur pada UU No. 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang berlakunya KUHP, antara lain ada pada Pasal IX, X, XI, XII dan XIII.

Pasal IX UU No. 1 Tahun 1946

Pasal IX : menentukan, membikin benda semacam mata uang juga sebagai tindak pidana sebagaimana dinyatakan :
Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal ini hampir mirip dengan ketentuan Pasal 244 KUHP dan dalam penyidikan Polri pada tindak pidana uang palsu sering hanya memasukkan Pasal 244 KUHP saja. Kemudian bagaimana relevansinya Pasal IX pada UU No. 1 Tahun 1946 dalam praktek penyidikan.

Pasal X UU No. 1 Tahun 1946

Seperti halnya Pasal 245 KUHP Pasal X ini juga menyebutkan, bahwa tersangka mengetahui kalau uang itu palsu, lalu dengan sengaja menjalankannya sebagai yang asli

Pasal XI UU No. 1 Tahun 1946

Pasal ini lebih pada pemakaian mata uang yang oleh Pemerintah sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal XII UU No. 1 Tahun 1946

Pasal ini lebih pada menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau menyimpan atau mengangkutnya, sedang ia mengetahui bahwa benda-benda itu sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal XIII UU No. 1 Tahun 1946

Hal yang dibahas dalam pasal ini mengenai perampasan barangnya, dapat dirampas seluruhnya walau bukan milik terpidana. Hal inipun mirip dengan Pasal 250 bis KUHP.

2. Pada Pasal 244 dan Pasal 245 yang mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana upal hanya sanksi pidana penjara lima belas tahun, sedangkan penyediaan alat-alat, barang-barang yang diketahuinya untuk memalsu uang dipidana selama-lamanya 6 (enam) tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah).

Perhatikan Pasal 244 dan Pasal 245 hanya satu sanksi yaitu penjara 15 (lima belas) tahun, disini hakim tidak punya alternatif penerapan sanksi artinya bahwa hakim tidak punya pilihan lain, selain sanksi penjara lima belas tahun.

Nampak dalam ketentuan sanksi pidana dari keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif, disinilah salah satu kelemahan menggunakan sarana hukum pidana juga pada tindak pidana upal.

Kemudian sanksi pidana pada tindak pidana upal bagi pengedar sama dengan pemalsu (lihat Pasal 245 KUHP, sanksi pidana 15 tahun), dimungkinkan dari penerapan Sanksi Pidananya tidak ada efek jera bagi pengedar, terbukti dengan adanya pengulangan tindak pidana. Disamping itu masih operasinya pelaku utama yang belum terungkap.

Kemudian Pasal 250, yang mengatur ketentuan mengenai bahan-bahan/barang-barang yang diketahuinya untuk memalsu uang ada 2 (dua) alternatif sanksi yaitu sanksi penjara 6 (enam) tahun atau denda Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah).

Hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pasal ini ada dua alternatif sanksi pidana yakni pidana penjara atau denda.

B. KEBIJAKAN YUDIKATIF (Aplikatif) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UANG PALSU

Pada bab terdahulu sudah dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal kebijakan hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan dalam upaya mensejahterahkan masyarakat.¹⁰⁴

Menganalisis kebijakan Hukum Pidana di bidang Uang Palsu, dilakukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, termasuk didalamnya pendekatan nilai. Karena titik berat masalahnya berada pada masalah menetapkan sarana yang paling efektif dan bermanfaat dalam mewujudkan tujuan penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu¹⁰⁵ pada khususnya dan Hukum Pidana pada umumnya. Masalah yang mendasar dalam pembahasan¹⁰⁶ kebijakan Hukum Pidana di bidang Uang Palsu adalah :

1. Perbuatan bagaimana yang dijadikan Tindak Pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana.

Bab ini akan menganalisis kebijakan yudikatif dalam menerapkan Tindak Pidana Uang Palsu dan bagaimana kebijakan legislatif, produk undang-undang dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 40.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Ibid hal 74.

¹⁰⁶ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, Ibid hal 106.

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan kebijakan yudikatif (aplikatif) di bidang Uang Palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang¹⁰⁷, yang mengadili pada tingkat pertama, Putusan Nomor : 45/Pid. B/2000/PN Semarang, tanggal 11 Oktober Tahun 2000, dalam kasus mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan, melanggar Pasal 245 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini adalah SWAPITONO Bin SODIKROMO, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 25 Mei 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Sumur Jurang RT. 01 RW.II Gunung Pati, Kotamadya Semarang, Pekerjaan Swasta, agama Islam.

b. Kasus Posisi

Pada bulan Januari 2000 terdakwa Swapitono kedatangan Suwandi di rumahnya, dan ditawarkan uang kertas RI, palsu, karena terdakwa Swapitono tidak punya uang, tawaran tersebut diterima dan mencari pembeli, nama Dedi. Setelah Dedi minta contoh, diberikan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar Suharto Emisi Tahun 1995.

Melihat kebenaran Upal yang ditawarkan Dedi memberi uang tanda jadi yang pertama Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian kedua Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), ketiga Rp.

¹⁰⁷ Putusan Nomor : 450/Pid.B/2000/PN.Smg Tanggal 25 Mei Tahun 2000.

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan keempat Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah keseluruhan Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Dedi menerima Uang Palsu pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) gambar Suharto Emisi Tahun 1995. Dan kedua menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) gambar Suharto Emisi Tahun 1995.

Pada bulan April 2000, terdakwa diberi uang palsu oleh Farid Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) gambar Suharto Emisi Tahun 1995, untuk itu dijual ke Dedi. Oleh terdakwa uang itu dititipkan ke Suwandi, oleh Suwandi dikembalikan, kemudian dititipkan ke Siti Maesah alamat Babadan Semarang. Kemudian janji dengan Dedi, ketemu di Jl. Sriwijaya di Wartel 98, dan datang orang tidak terkenal mengajak minum di depan SMU I Semarang, pada saat minum terdakwa ditangkap oleh petugas dan semua barang bukti di sita petugas¹⁰⁸.

- c. Dari kasus posisi tersebut di atas Penyidik menerapkan penyidikannya pada Pasal 245 jo Pasal 55 KUHP.
- d. Putusan PN Semarang Nomor : 450/Pid. B/2000/PN Semarang yang didahului dengan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" telah menjatuhkan keputusan perkara terdakwa SWAPITONO Bin SODIKROMO melanggar Pasal 245 Jo. 55 (1) ke 1 KUHP yang mana terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2000, sampai dengan sekarang, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa : SWAPITONO Bin SODIKROMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Turut serta mengedarkan mata uang atau uang kertas seperti yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank yang asli atau tidak dipalsu padahal diketahui saat diterima seperti uang/uang kertas palsu ;

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Ibid hal 2.

- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan ;
- Memerintahkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - ☒ 4 lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu ;
 - ☒ 2 lembar uang palsu pecahan dua puluh ribu ;
 - ☒ 960 lembar uang palsu pecahan lima puluh ribu yang belum terpotong ;
 - ☒ 9 gulung kertas untuk membuat uang palsu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Dari kronologis kasus tersebut dan putusan Hakim bagi terdakwa Swapitono bin Sodikromo adalah hanya sebagai pengedar, dan pelaku utama yang membuat atau memalsu uang sulit dan belum terungkap, karena terdakwa sebagai pengedar tidak mengetahui identitas pelaku yang membuat Upal. Akhirnya pelaku masuk dalam Daftar pencarian Orang/DPO. Analisis ini menunjukkan bahwa penyebab utama/pelaku tidak mudah ditangkap, karena dia tidak mengenalkan diri pada orang yang disuruh mengedarkan. Dengan demikian pelaku utama masih bebas dan dimungkinkan masih melakukan Tindak Pidana.

Dalam rangka mengantisipasi semaraknya Tindak Pidana di bidang Uang Palsu, Polri menjabarkan Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol Juklap/72/II/1993 tentang "Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Bagi Satuan Reserse", dinyatakan bahwa:

- a. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat senantiasa dituntut untuk dapat

menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam rangka menghadapi setiap bentuk gangguan Kamtibmas dimaksud diperlukan suatu pola dan cara bertindak yang sistematis sesuai dengan kasus yang dihadapi.
- c. Reserse sebagai salah satu Fungsi Operasional Polri bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum dalam hubungannya dengan Criminal Justice System, sehingga mampu menangani dan menanggulangi setiap kasus Kriminalitas tersebut secara cepat, tepat, tuntas dan murah.
- d. Petunjuk Lapangan ini merupakan petunjuk praktis bagi setiap petugas Polri di lapangan dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana uang palsu

Maksud dan Tujuan

- a. Maksud, Petunjuk Lapangan ini dimaksudkan sebagai pedoman setiap petugas Polri di lapangan dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Tujuan, supaya dapat terwujud adanya kesamaan dan kesatuan tindakan sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

Dasar-dasar Kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No. Pol. : Jukin/01/II/1993 tanggal 1 Februari tentang Petunjuk Induk Polri Bidang Operasi Kepolisian.
- b. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang Penanggulangan Gangguan Kamtibmas bagi Satuan Operasional Polri dilapangan.

Penggolongan

Petunjuk Lapangan ini disusun dan penggolongan sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum.
- b. Langkah-langkah yang diambil.
- c. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Reserse dalam Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu adalah sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

Mendasari tugas pokok Kepolisian Negara RI memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹⁰⁹, POLRI dalam menindak Tindak Pidana Upal dengan dasar :

¹⁰⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002, Pasal 13.

- 1) KUHP Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 Bis, 251, 252.
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 Pasal IX, X, XI, XII.
- 3) UU No. 8/1981 (KUHP).
- 4) Petunjuk teknis Kapolri No. Pol. : Juknis/20/VIII/1991 tentang Cara Penanganan Barang Bukti Uang Palsu.
- 5) Petunjuk teknis Kapolri No. Pol. : Juknis/21/VIII/1991 tentang sistem laporan kasus uang palsu.
- 6) Petunjuk teknis Kapolri No. Pol. : Juknis/25/VIII/1991 tentang Penyidikan dan Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu.

b. Langkah-langkah yang diambil¹¹⁰

- 1) Persiapan
 - a) Siapkan peralatan lapangan antara lain : loop, ultra, violet, kertas tipis dan pensil.
 - b) Siapkan Blanko Laporan Kasus Penemuan Uang Palsu.
 - c) Siapkan amplop dan peralatan untuk mensegel barang bukti uang palsu.
 - d) Siapkan blanko-blanku yang berkaitan dengan administrasi penyidikan.

¹¹⁰ Petunjuk Induk POLRI No. Pol.: JUKIN/01/II/1993 tanggal 1 Pebruari 1993 tentang Petunjuk Induk POLRI Bidang Operasional Kepolisian.

2) Urut-urutan

a) Terhadap kasus penemuan uang

- (1) Buat laporan segera mulai dari kesatuan terbawah kesatuan teratas secara berjenjang dalam tempo 1 x 24 jam.
- (2) Kasus temuan Upal tidak termasuk daftar GK.
- (3) Laporan segera disertakan/dilampirkan BB Upal yang ditemukan, dan BB Upal dapat berubah menjadi kasus apabila dikemudian hari dapat ditemukan tersangka/pelakunya.

b) Terhadap kejahatan Uang Palsu

- (1) Buat laporan cepat yang berisi antara lain :
 - (a) Macam kejadian (pembuatan/pengedaran).
 - (b) Tempat dan tanggal kejadian.
 - (c) Identitas tersangka.
 - (d) Identitas Saksi/pelapor.
 - (e) Jenis barang bukti :
 - Jenis uang palsu RI atau uang asing.
 - Pecahan atau nilai nomina.
 - Serial tahun dan tahun pembuatan.
 - Teknik cetak (sablon, cetak print, dll).
 - Modus operandi.
- (2) Buat laporan kemajuan, laporan lengkap.

Sesuai Ketentuan Perundang-undangan¹¹⁶, dengan pertimbangan menurut penilaian sendiri karena POLRI pada dasarnya bekerja secara individu dengan masyarakat mencari keadilan¹¹⁷.

Penjabaran Juklap tersebut di atas diperoleh data penanganan Tindak Pidana Uang palsu bagi Polri Polda Jateng Tahun 1997 s/d 2000 sebagai berikut :

¹¹⁶ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 114-115.

¹¹⁷ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negera Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal 13-15.

Bagan 4
**DATA TINDAK PIDANA UANG PALSU SEJAJARAN POLDA JATENG
TAHUN 1997***

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	TEMPAT KEJADIAN	TEHNIK PEMBUATAN	JUMLAH BARANG BUKTI	EMISI TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	1997	-	1. Wil. BMS	-	-	-	-	NIHIL
		4 Kasus	2. Wil. PKL	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 423 Lbr = Rp 21,150,000 Rp 20,000 x 7 Lbr = Rp 140,000 Rp 10,000 x 108 Lbr = Rp 1,080,000 Jumlah = Rp 22,370,000	1995 1992 1992	7 orang	P 21 (Berkas dikirim ke Penuntut Umum), siap proses Pengadilan
		8 Kasus	3. Wil. SMG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 145 Lbr = Rp 7,250,000 Rp 10,000 x 43 Lbr = Rp 430,000 Rp 20,000 x 83 Lbr = Rp 1,660,000 Jumlah = Rp 9,340,000	1995 1992 1992	17 orang	P 21
		8 Kasus	4. Wil. PATI	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 54 Lbr = Rp 2,700,000 Rp 20,000 x 184 Lbr = Rp 3,680,000 Rp 10,000 x 164 Lbr = Rp 1,640,000 Jumlah = Rp 8,020,000	1995 1992 1992	14 orang	P 21
		6 Kasus	5. Wil. SKA	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 70 Lbr = Rp 3,500,000 Rp 20,000 x 95 Lbr = Rp 1,900,000 Rp 10,000 x 526 Lbr = Rp 5,260,000 Jumlah = Rp 10,660,000	1995 1992 1992	13 orang	P 21
		7 Kasus	6. Wil. KEDU	- Cetak Offset - Foto copy colour - Lukis/Gambar	Rp 50,000 x 3 Lbr = Rp 150,000 Rp 20,000 x 273 Lbr = Rp 5,460,000 Rp 10,000 x 597 Lbr = Rp 5,970,000 Jumlah = Rp 11,580,000	1995 1992 1992	17 orang	P 21
		2 Kasus	7. TABES SMG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 2 Lbr = Rp 100,000 Rp 20,000 x 368 Lbr = Rp 7,360,000 Rp 10,000 x 857 Lbr = Rp 8,570,000 Jumlah = Rp 16,030,000	1995 1992 1992	2 orang	P 21
			8. POLDA JTG	-	-	-	-	NIHIL

* Data Tindak Pidana Upal Tahun 1997 s/d Tahun 2001 Polda Jawa Tengah

Bagan 5
**DATA TINDAK PIDANA UANG PALSU SEJAJARAN POLDA JATENG
TAHUN 1998**

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	TEMPAT KEJADIAN	TEHNIK PEMBUATAN	JUMLAH BARANG BUKTI	EMISI TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	1998	-	1. Wil. BMS	-	-	-	-	NIHIL
		5 Kasus	2. Wil. PKL	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 431 Lbr = Rp 21,550,000 Rp 20,000 x 5 Lbr = Rp 100,000 Rp 10,000 x 112 Lbr = Rp 1,120,000 Jumlah = Rp 22,770,000	1995 1992 1992	15 orang	P 21
		13 Kasus	3. Wil. SMG	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 150 Lbr = Rp 7,500,000 Rp 10,000 x 50 Lbr = Rp 500,000 Rp 20,000 x 101 Lbr = Rp 2,020,000 Jumlah = Rp 10,020,000	1995 1992 1992	19 orang	P 21
		10 Kasus	4. Wil. PATI	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 45 Lbr = Rp 2,250,000 Rp 20,000 x 175 Lbr = Rp 3,500,000 Rp 10,000 x 155 Lbr = Rp 1,550,000 Jumlah = Rp 7,300,000	1995 1992 1992	18 orang	P 21
		12 Kasus	5. Wil. SKA	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 62 Lbr = Rp 3,100,000 Rp 20,000 x 85 Lbr = Rp 1,700,000 Rp 10,000 x 521 Lbr = Rp 5,210,000 Jumlah = Rp 10,010,000	1995 1992 1992	18 orang	P 21
		9 Kasus	6. Wil. KEDU	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 5 Lbr = Rp 250,000 Rp 20,000 x 276 Lbr = Rp 5,520,000 Rp 10,000 x 497 Lbr = Rp 4,970,000 Jumlah = Rp 10,740,000	1995 1992 1992	19 orang	P 21
		2 Kasus	7. TABES SMG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 5 Lbr = Rp 250,000 Rp 20,000 x 72 Lbr = Rp 1,440,000 Rp 10,000 x - Lbr = Rp - Jumlah = Rp 1,690,000	1995 1992 1992	3 orang	P 21
			8. POLDA JTG	-	-	-	-	NIHIL

^{*)} Data Tindak Pidana Upal Tahun 1997 s/d Tahun 2001 Polda Jawa Tengah

Bagan 6
**DATA TINDAK PIDANA UANG PALSU SEJAJARAN POLDA JATENG
TAHUN 1999***

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	TEMPAT KEJADIAN	TEKNIK PEMBUATAN	JUMLAH BARANG BUKTI	EMISI TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	1999	-	1. Wil. BMS 2. Wil. PKL	- - Cetak Offset	- Rp 50,000 x 425 Lbr = Rp 21,250,000 Rp 20,000 x 7 Lbr = Rp 140,000 Rp 10,000 x 114 Lbr = Rp 1,140,000 Jumlah = Rp 22,530,000	- 1995 1992 1992	- 9 orang	NIHIL P 21
		3 Kasus	3. Wil. SMG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 140 Lbr = Rp 7,000,000 Rp 10,000 x 75 Lbr = Rp 750,000 Rp 20,000 x 36 Lbr = Rp 720,000 Jumlah = Rp 8,470,000	1995 1992 1992	15 orang	P 21
		6 Kasus	4. Wil. PATI	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 54 Lbr = Rp 2,700,000 Rp 20,000 x 193 Lbr = Rp 3,860,000 Rp 10,000 x 173 Lbr = Rp 1,730,000 Jumlah = Rp 8,290,000	1995 1992 1992	10 orang	P 21
		8 Kasus	5. Wil. SKA	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 54 Lbr = Rp 2,700,000 Rp 20,000 x 75 Lbr = Rp 1,500,000 Rp 10,000 x 426 Lbr = Rp 4,260,000 Jumlah = Rp 8,460,000	1995 1992 1992	10 orang	P 21
		11 Kasus	6. Wil. KEDU	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 7 Lbr = Rp 350,000 Rp 20,000 x 176 Lbr = Rp 3,520,000 Rp 10,000 x 437 Lbr = Rp 4,370,000 Jumlah = Rp 8,240,000	1995 1992 1992	1 orang	P 21
		1 Kasus	7. TABES SMG	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 1 Lbr = Rp 50,000 Rp 20,000 x 75 Lbr = Rp 1,500,000 Rp 10,000 x - Lbr = Rp - Jumlah = Rp 1,550,000	1995 1992 1992	3 orang	P 21
		1 Kasus	8. POLDA JTG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 2370 Lbr = Rp 118,500,000 Rp 20,000 x 9 Lbr = Rp 180,000 Rp 10,000 x - Lbr = Rp - Jumlah = Rp 118,680,000	1995 1992 1992	2 orang	P 21

* Data Tindak Pidana Upal Tahun 1997 s/d Tahun 2001 Polda Jawa Tengah

Bagan 7
**DATA TINDAK PIDANA UANG PALSU SEJAJARAN POLDA JATENG
TAHUN 2000***

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	TEMPAT KEJADIAN	TEHNIK PEMBUATAN	JUMLAH BARANG BUKTI		EMISI TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1	2000	-	1. Wil. BMS 2. Wil. PKL	- - Cetak Offset	- Rp 50,000 x 429 Lbr = Rp 21,450,000 Rp 20,000 x 5 Lbr = Rp 100,000 Rp 10,000 x 106 Lbr = Rp 1,060,000 Jumlah = Rp 22,610,000		- 1995 1992 1992	- 13 orang	NIHIL P 21
		8 Kasus	3. Wil. SMG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 145 Lbr = Rp 7,250,000 Rp 10,000 x 83 Lbr = Rp 830,000 Rp 20,000 x 42 Lbr = Rp 840,000 Jumlah = Rp 8,920,000		1995 1992 1992	19 orang	P 21
		10 Kasus	4. Wil. PATI	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 65 Lbr = Rp 3,250,000 Rp 20,000 x 185 Lbr = Rp 3,700,000 Rp 10,000 x 164 Lbr = Rp 1,640,000 Jumlah = Rp 8,590,000		1995 1992 1992	17 orang	P 21
		1 Kasus	5. Wil. SKA	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 97 Lbr = Rp 4,850,000 Rp 20,000 x 127 Lbr = Rp 2,540,000 Rp 10,000 x 633 Lbr = Rp 6,330,000 Jumlah = Rp 13,720,000		1995 1992 1992	11 orang	P 21
		3 Kasus	6. Wil. KEDU	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 1 Lbr = Rp 50,000 Rp 20,000 x 368 Lbr = Rp 7,360,000 Rp 10,000 x 857 Lbr = Rp 8,570,000 Jumlah = Rp 15,980,000		1995 1992 1992	21 orang	P 21
		1 Kasus	7. TABES SMG	- Cetak Offset - Foto copy colour	Rp 50,000 x 2 Lbr = Rp 100,000 Rp 20,000 x 61 Lbr = Rp 1,220,000 Rp 10,000 x - Lbr = Rp - Jumlah = Rp 1,320,000		1995 1992 1992	1 orang	P 21
		2 Kasus	8. POLDA JTG	- Cetak Offset	Rp 50,000 x 7113 Lbr = Rp 355,650,000 Rp 20,000 x 10 Lbr = Rp 200,000 Rp 10,000 x - Lbr = Rp - Jumlah = Rp 355,850,000		1995 1992 1992	3 orang	P 21

* Data Tindak Pidana Upat Tahun 1997 s/d Tahun 2001 Polda Jawa Tengah

Dari data kasus uang palsu (Upal) di wilayah hukum Polda Jateng dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 penulis menanggapi bahwa kasus tindak pidana upal yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng dan diproses berasal dari laporan pengaduan masyarakat, penemuan dari Bank Indonesia (BI) dan tertangkap tangan langsung oleh Penyidik.

Dari data dalam Tabel 1 di atas, dapat dikatakan bahwa penyebaran Upal meliputi seluruh wilayah POLDA Jawa Tengah, kecuali Polwil Banyumas yang tidak terungkap. Sedangkan nominal uang yang dipalsukan meliputi Rp 50.000,-; Rp 20.000,- dan Rp 10.000,-. Cara pemalsuan dengan menggunakan cetak offset atau foto copy colour serta lukis/gambar¹¹⁸.

Dinyatakan oleh **Drs. Rusbagyo Ishak, SH**, Kadit Serse Polda Jawa Tengah bahwa Polwil Pekalongan, Semarang, Pati, Surakarta, kedua dan Tabes Semarang, tahun 1997, 1998 1999 dan tahun 2000 menangani kasus uang palsu, sedangkan Polda Jateng hanya tahun 1999 dan tahun 2000, karena Polda Jateng sifatnya hanya mem-back up kasus-kasus wilayah, yang mempunyai kriteria :

- Kasus yang sudah ditangani wilayah yang belum selesai dengan batas 2 tahun.
- Kasus-kasus tindak pidana yang berskala Nasional.
- Dan kasus-kasus tindak pidana atensi dari Pimpinan Polda Jateng.

¹¹⁸ Observasi, 2 Pebruari 2002.

Kemudian untuk menentukan jumlah secara keseluruhan data tindak pidana uang palsu dari tahun 1997 s/d tahun 2001 mengenai jumlah kasus, jumlah barang bukti dan jumlah pelaku, terlihat seperti pada Bagan 8 di halaman berikut ini.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH

Bagan 8

DATA TINDAK PIDANA UANG PALSU SEJAJARAN POLDA JATENG 5 TAHUN TERAKHIR
TAHUN 1997 S/D TAHUN 2001*

TAHUN	JUMLAH KASUS	TEMPAT KEJADIAN	TEHNIK PEMBUATAN	JUMLAH BARANG BUKTI		JUMLAH TERSANGKA	KETERANGAN
1997s/d2001	-	1. Polwil BMS	-	Rp 50,000 x	1889 Lbr = Rp 94,450,000	-	NIHIL P 21 (Berkas diterima Penuntut Umum)
	25 Kasus	2. Polwil PKL	- Cetak Offset	Rp 20,000 x	31 Lbr = Rp 620,000	45 orang	
				Rp 10,000 x	440 Lbr = Rp 4,400,000		
	35 Kasus	3. Polwil SMG	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	99,470,000	70 orang	P 21
				Rp 50,000 x	581 Lbr = Rp 29,050,000		
				Rp 20,000 x	332 Lbr = Rp 6,640,000		
				Rp 10,000 x	173 Lbr = Rp 1,730,000		
	34 Kasus	4. Polwil PATI	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	37,420,000	59 orang	P 21
			- Foto copy colour	Rp 50,000 x	218 Lbr = Rp 10,900,000		
				Rp 20,000 x	737 Lbr = Rp 14,740,000		
				Rp 10,000 x	656 Lbr = Rp 6,560,000		
	25 Kasus	5. Polwil SKA	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	32,200,000	52 orang	P 21
				Rp 50,000 x	283 Lbr = Rp 14,150,000		
				Rp 20,000 x	382 Lbr = Rp 7,640,000		
				Rp 10,000 x	2106 Lbr = Rp 21,060,000		
	30 Kasus	6. Polwil KEDU	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	42,850,000	68 orang	P 21
			- Lukis	Rp 50,000 x	14 Lbr = Rp 700,000		
				Rp 20,000 x	1093 Lbr = Rp 21,860,000		
				Rp 10,000 x	2388 Lbr = Rp 23,880,000		
	5 Kasus	7. POLTABES SEMARANG	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	46,440,000	9 orang	P 21
			- Foto copy colour	Rp 50,000 x	10 Lbr = Rp 500,000		
				Rp 20,000 x	227 Lbr = Rp 4,540,000		
				Rp 10,000 x	- Lbr = Rp -		
	3 Kasus	8. POLDA JATENG	- Cetak Offset	Jumlah = Rp	5,040,000	5 orang	P 21
				Rp 50,000 x	9483 Lbr = Rp 474,150,000		
				Rp 20,000 x	19 Lbr = Rp 380,000		
				Rp 10,000 x	- Lbr = Rp -		
	157 Kasus		- Cetak Offset	Jumlah = Rp	474,530,000	308 orang	P 21
			- Foto copy colour	Rp 50,000 x	12478 Lbr = Rp 623,900,000		Selama 5 tahun
			- Lukis/Gambar	Rp 20,000 x	2821 Lbr = Rp 56,420,000		
				Rp 10,000 x	5763 Lbr = Rp 57,630,000		
				Jumlah = Rp	737,950,000		

* Data Tindak Pidana Upal Tahun 1997 s/d Tahun 2001 Polda Jawa Tengah

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dari 157 kasus uang palsu yang terbanyak terjadi adalah di Polwil Semarang ialah 35 kasus, Polwil Pati 34 kasus, Polwil Kedu 30 kasus serta Polwil Pekalongan dan Polwil SKA 25 kasus. Tabes Semarang dan Polda Jateng hanya terjadi 5 dan 3 kasus.

Adapun jumlah barang bukti yang dapat disita yang paling banyak adalah nominal Rp 50.000,- sebanyak 12.478 lembar, nominal Rp 20.000,- sebanyak 2.821 lembar dan nominal Rp 10.000,- sebanyak 5.763 lembar.

Walaupun Polda Jateng hanya menangani 3 kasus (yang relatif kecil), namun dari barang bukti yang dapat disita yang paling banyak ialah nominal Rp 50.000,- sebanyak 9.483 lembar yang berarti senilai Rp 474.150.000,- yang hampir lebih dari 50% dari nilai keseluruhan yaitu Rp 737.950.000,-¹¹⁹

Jumlah pelaku dari data tahun 1997 s/d tahun 2001 jumlah 157 orang yang terbanyak dari Polwil Semarang 70 orang, Polwil Kedu 68 orang dan Polwil Pati 59 orang, Polwil Surakarta 52 orang, Polwil Pekalongan 45 orang, sedangkan dari Poltabes Semarang 9 orang dan di Polda Jateng ada 5 orang.

Yang telah diselesaikan oleh Pengadilan berjumlah 157 kasus, dan rata-rata kasus Tindak Pidana Uang Palsu seluruhnya selesai

¹¹⁹ Data Kapolres-Kapolres dan Poltabes Semarang Wilayah Hukum Polda Jateng tentang Tindak Pidana Upai Tahun 1997 s/d Tahun 2001.

disidik dan semua berkas diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan siap diproses dalam persidangan Pengadilan.

Penyidikan Tindak Pidana Upal yang telah selesai disidik oleh Penyidik Pola Jateng yang sinergi dan protagonis dengan menempatkan pola penanggulangan Penyidik dalam menerapkan Hukum Pidana¹²⁰, seluruh berkas oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21).

Dari data Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut di atas adalah kasus yang ditangani Penyidik Polda Jateng dari tahun 1997 sampai tahun 2001, jumlah 157 kasus yang rata-rata pemalsuannya dari cetak offset, foto copy colour dan dengan cara melukis/menggambar dan jumlah nominal yang dipalsukan Rp 737.950.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tersangka 308 orang rata-rata putusan pengadilan dengan pidana penjara 4 bulan sampai 4 tahun penjara¹²¹.

Dari keterangan terdakwa yang disidangkan rata-rata mengetahui kepalsuan uang rupiah tersebut¹²², dan dengan maksud mengedarkan, menjual belikan sebagaimana uang asli yang tidak dipalsukan. Untuk kepentingan diri sendiri dalam mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan

¹²⁰ Justice Without Trial, Law Enforcement in Democratic Society, 1996.

¹²¹ Afdori, Wawancara Pribadi, Bag. Sie Pidana Umum Pengadilan Negeri Semarang, 1 April 2002.

¹²² Ismail Marzuki, Wawancara Pribadi, Kabag Bidang Pidana Umum Pengadilan Negeri Semarang, 1 April 2002.

dalam Tindak Pidana ini ikut serta dalam mengedarkan uang palsu tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 KUHP dan ikut serta sesuai dengan pasal 55, pasal 56 KUHP¹²³.

Kendala dalam penyidikan Tindak Pidana Upal ini biasanya tersangka tidak mengetahui identitas dari yang menyuruh melakukan (pelaku utamanya), sehingga mesin yang digunakan untuk mencetak uang dan bahan-bahan kertas yang persis dengan aslinya sulit untuk didapatkan. Hal ini salah satunya yang membuat Tindak Pidana Upal berkembang, baik kualitas maupun kuantitas (lihat Tabel 1 & Tabel 2).

Penerapan pidana pada tindak pidana uang palsu sebagaimana dimaksud pada pasal KUHP Pasal 244, 245, 246, 247, 249, pasal 250, 250 bis, 251, 252 dan UU No. 1 tahun 1946 pasal IX, X, XI, XII, XIII.

Dari pasal KUHP tersebut di atas yang paling mengena dalam tindak pidana uang palsu adalah pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dengan menggunakan ancaman pidana tunggal, sehingga tidak ada pilihan bagi hakim kecuali menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja yang sudah tercantum pada Pasal 244 KUHP¹²⁴, sehingga nampak kaku. Seyogyanya ada penambahan pidana denda bagi barang siapa yang meniru atau memalsukan uang atau uang

¹²³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, ibid hal 68.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op Cit hal 169.

kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud mengedarkan (seperti Pasal 245 KUHP) atau menyuruh mengedarkan dengan pertimbangan pidana bagi residivis (Pasal 126 ayat 2 Konsep Tahun 2000).

Pasal 245 ; barang siapa menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan yaitu mata uang yang ditiru atau dipalsukan sendiri, penulis mengusulkan untuk ditambah dengan jenis pidana denda.

Sedangkan Pasal 249 membahas keikutsertaan menjalankan mata uang yang diketahuinya palsu atau dikurangkan (dirusakkan), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-; Itupun penulis mengusulkan agar adanya penambahan nominal jenis pidana denda disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku.

Pasal 250 mengena dan ada kaitannya dengan tindak pidana uang palsu yang berkaitan dengan membuat atau penyediaan bahan atau barang yang diketahuinya bahwa itu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangkan harga mata uang atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, seyogyanya ditambah.

Pasal 250 Bis menerangkan bahwa semua barang yang menjadi pangkal kejahatan harus dirampas sekalipun bukan milik tersangka.

Pasal 251 lebih pada perijinan mengenai masuknya keping-keping perak atau papan-papan perak ke Pemerintah, yang harus ada ijin Kepala Pemerintah Daerah dan jika ternyata keping-keping tadi di cap dan menyerupai mata uang dan dipakainya sebagai mata uang yang asli dipidana, hal ini dikandung maksud untuk mencegah supaya jangan sampai ada barang-barang yang diedarkan di Indonesia yang menyerupai mata uang.

Barangsiapa dengan sengaja dan tidak dengan mendapat izin dari Kepala Pemerintah Daerah, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak seratus lima puluh ribu rupiah. Seyogyanya jenis pidana penjara maupun jenis pidana dendanya ditambah.

Pasal 252 membahas lebih pada akibat pemalsuan uang, maka hak-hak orang yang melakukan Tindak Pidana dicabut hak-haknya antara lain : hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, masuk menjadi A.B.R.I, memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum dan hak menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

Seperti yang dinyatakan oleh **AKBP Drs. Hendrawan, SH**, Sesdit Serse Polda Jawa Tengah bahwa ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana Upal pada pasal-pasal KUHP dan penerapan proses pengadilan sampai pada keputusan hakim rasanya perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi lembaga peradilan yang mampu menangani dengan cepat – tepat, sehingga penanggulangan Tindak Pidana ini tidak meluas.

C. KEBIJAKAN LEGISLATIF (Formulatif) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UPAL DIMASA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM)

Menurut Barda Nawawi Arief mengutip dari Habib-Ur Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime – It Is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal*, sebagai berikut :

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksudnya problem tentang kejahatan – pen). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebab agar dapat mengendalikannya, tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus”.¹²⁵

Tindak pidana uang palsu, adalah tindak pidana dimana sebagai salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan bisa bernuansa Politik. Jika dibiarkan dan berkembang dapat berakibat ketidakpercayaan internasional terhadap mata uang rupiah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kasus yang berkaitan dengan upal meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya harus segera ditanggulangi. Penanggulangan dengan hukum pidana adalah salah satu cara penanggulangan dalam mewujudkan komitmen reformasi yakni Supremasi Hukum¹²⁶. Masalah tindak pidana yang harus mendapat

¹²⁵ Habib-Ur Rahman Khan dalam buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, 1994, hal 16.

¹²⁶ Salahudin Susilo, *Menegakkan Amanat Reformasi Melalui Reformasi Mental 2002*, sebuah IJTihad Politik, Kajian ke 17, Forum Kajian Kontemporer Islami, Semarang, 2002, hal 1.

perhatian serius bagi Lembaga Peradilan dalam rangka menangkal dan menanggulangi Tindak Pidana Upal dengan Hukum Pidana adalah mampu memposisikan Hukum Pidana secara efektif dan efisien kepada para pelaku.

Timbulnya uang palsu adalah sebagai akibat dari berkembangnya/dinamisasi masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah.¹²⁷

Dan demi mewujudkan Indonesia negara hukum (*Rechtsstaat*) dan penegasan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka mengandung spirit untuk terciptanya "*good government*" yang selalu mendambakan badan legislatif yang kuat, birokrasi eksekutif yang profesional, kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, partisipasi masyarakat yang mantab (*civil society*) dan otonomi daerah yang adil.¹²⁸

Tindak pidana uang palsu menjadi tindak pidana yang mengganggu, meresahkan dan membahayakan, tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara.

Untuk menanggulangi diperlukan upaya-upaya baik untuk mengobati gejala atau akibat yang ada maupun untuk menghilangkan

¹²⁷ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2000, hal 01.

¹²⁸ Muladi, *Evaluasi Terhadap Reformasi Lembaga Peradilan*, Pengamatan dan Partisipan Sebagai Menkeh Dua Tahun, Jakarta, 2000, hal 1.

sebab-sebabnya, salah satu penyebab timbulnya Tindak Pidana Upal adalah perkembangan ekonomi itu sendiri. Menurut **Howard Jones**, bahwa perkembangan kejahatan di bidang ekonomi, ekonomi itu sendiri sebagai biang dari perkembangan kejahatan¹²⁹, baik dengan memberikan reaksi sanksi pidana kepada pelanggar maupun memberikan perlindungan kepada korban atau pihak yang dirugikan.

Dengan mendasarkan pada pandangan Hoefnagels dan Barda Nawawi Arief mengenai masalah pokok (*central problem*) dari kejahatan¹³⁰, maka upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang Upal harus melalui kebijakan yang bersifat integral dan terpadu. Kebijakan yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, dengan kebijakan penal.¹³¹ Penanggulangan tindak pidana di bidang uang palsu tidak bisa hanya menyandarkan pada peran hukum pidana, karena hukum pidana hanya menyelesaikan sebagian masalah saja dan mestinya ada upaya diselesaikan melalui upaya-upaya pencegahan, penggunaan hukum pidana tidak menyelesaikan masalah penyebabnya, khususnya kerugian masyarakat kecil sebagai korban Upal. Hukum pidana tidak melihat

¹²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 32.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid* hal 52.

¹³¹ Lihat kembali Pandangan Barda Nawawi Arief dan Hoefnagels dalam gambar 1 halaman 12 dan gambar 7 hal 69.

- (3) Amankan TKP dan kumpulkan, sita, segel dan adakan pemeriksaan kepada Saksi dan tersangka.
- (4) Kirimkan barang bukti ke Labkrim.
- (5) Pemberkasan Berita Acara siap ajukan ke PU.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Tidak diperkenankan memfoto copy dari setiap uang palsu yang ditemukan dan atau menyebarkan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik¹¹¹.

Administrasi

- a. Dukungan administrasi dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu.
 - 1) Administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat dilaksanakan sesuai dengan Jukminu Hankam/ABRI.
 - 2) Administrasi yang berhubungan dengan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Jukminu tentang Administrasi Penyidikan.
- b. Dukungan logistik dan anggaran dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Logistik menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
 - 2) Anggaran menggunakan anggaran rutin atau anggaran khusus.

¹¹¹ Hal penting yang terdapat dalam Petunjuk Induk POLRI dalam rangka Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu, sesuai dengan catatan kaki No. 105.

- c. Petunjuk lapangan ini dilampiri dengan leaflet untuk lebih memudahkan bagi setiap Penyidik dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- d. Ketentuan perubahan-perubahan dan berlakunya wewenang pembinaan petunjuk ini ada pada Kapori, karenanya usaha/saran perbaikan/penyempurnaan agar disampaikan kepada Kapori.
- e. Petunjuk Lapangan tentang Pendidikan Tindak Pidana Uang palsu ini berlaku sejak ditetapkan.¹¹²

Oleh G.P. Hoefnagels, kewenangan yang dilakukan oleh penyidik yang berwenang menjalankan tugas penanggulangan secara preventif itu disebut "*Prevention Without Punishment*"¹¹³ yang diharapkan profesional walaupun dengan kesejahteraan minim¹¹⁴ tugas-tugas kepolisian preventif yang didasarkan atas kewajiban/Lichtmatigheid dengan tidak semua peristiwa diteruskan ke Kejaksaaan, karena tugas-tugas POLRI tersebut dapat bersifat Represive Yustisial maupun Non Yustisial¹¹⁵, dengan demikian Polisi dapat melakukan Diskresi Kepolisian

112 Juklap No. Pol : Juklap/72/II/1993 tentang Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Bagi Satuan Reserse.

113 Hoefnagels G. Peter, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal 56.

114 Abdul Wahid, Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997.

115 M. Sanoesi, *Kepala Kepolisian RI, Sambutan Pada Seminar Kriminologi V*, di Semarang, 11 Nopember 1986, hal 9.

masalah sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan dan hanya merupakan bagian kecil (Sub Sistem) dari kontrol sosial. Hukum pidana juga tidak menghilangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana di bidang Upal. Hukum pidana hanya memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat dengan memberikan reaksi atas kejahatan yang timbul. Untuk itu diperlukan kebijakan dengan hukum pidana yang digunakan satu-satunya dalam upaya penanggulangannya tindak pidana upal.

1. Kebijakan Pencegahan/Tindakan Preventif Sebelum diterapkannya Hukum Pidana (KUHP)

Upaya ini dalam penanggulangan tindak pidana di bidang Upal yang berperan dalam mensosialisasikan keaslian uang rupiah di masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah upaya yang menggunakan sarana media massa atau media elektronik, atau dengan melakukan penyuluhan, forum diskusi atau seminar, training, planning, dll. Upaya-upaya tersebut di atas sampai saat ini belum dioptimalkan, walaupun sudah dilakukan. Sasaran kegiatan masih terbatas pada kelompok tertentu masyarakat seperti penegak hukum, akademis, atau kelompok profesi dan belum sampai pada masyarakat umum. Informasi melalui media massa dan media elektronik yang dapat mencapai masyarakat sampai ke daerah-daerah belum banyak dilakukan.

Pada hal berbagai informasi atau pesan mengenai keaslian rupiah dalam media massa atau media elektronik dalam bentuk artikel, berita atau iklan layanan masyarakat akan sangat membantu dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang keaslian uang. Masalah ini seharusnya juga ditangani secara serius, karena masalah kesadaran hukum mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan sub sistem hukum lainnya, seperti substansi hukum dan aparat penegak.

Disamping itu upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan-kebijakan sosial lainnya di bidang ekonomi, sosial dan politik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial ekonomi yang menjadi sumber timbulnya tindak pidana di bidang Uang Palsu.

Dalam kondisi sosial, ekonomi dan politik yang lemah masyarakat tertentu baik pemodal maupun masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya termasuk melakukan peniruan atau pemalsuan, menggunakan barang hasil tiruan yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha yang relatif mudah walaupun dengan resiko penjara. Di sisi lain masyarakat pengedar juga akan mengedarkan hasil pemalsuan dan pengedaran yang relatif lebih mudah daripada harus berjuang mencari uang asli secara legal.

Berdasarkan ketentuan di bidang penanggulangan Upal dengan hukum pidana (KUHP) menurut pandangan penulis yang

mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang adalah Pasal 244. Sedangkan Pasal 245, delik penyebaran/pengeluarnya. Pasal 246, 247, 249, 250, 250 Bis, 251, 252 KUHP yang berhubungan dengan pemalsuan uang, antara lain mengatur Tindak Pidana Upal tapi mengatur peredaran, pengurangan nilai uang, perusakan uang, memasukkan keping-keping serupa uang, ke negara RI dan perampasan barang-barang yang dipersiapkan untuk memalsu uang, serta pencabutan hak-hak bagi pelaku Tindak Pidana Upal.

Dengan mencermati pasal-pasal tersebut di atas, terlihat bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur hal tindak pidana uang palsu (Upal) hanya dengan sanksi pidana penjara saja, khususnya Pasal 244, 245, 246, 247, 252. Selain itu Pasal 249, 250 dan 251 pidana penjara atau denda.

2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu Dengan Hukum Pidana di Masa yang akan Datang (Ius Constituendum)

Salah satu upaya hukum yang seringkali dipakai atau digunakan dan tidak dapat diabaikan peranannya dalam penanggulangan kejahatan salah satunya adalah dengan hukum pidana. Hal ini disebabkan hukum pidana dapat digunakan sebagai alat pencelaan masyarakat atas perbuatan yang melanggar norma, moral masyarakat. Hukum pidana juga mempunyai fungsi yang tidak dimiliki upaya hukum lainnya, misalnya fungsi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun dengan menggunakan hukum pidana dipandang kurang memadai perkembangan masyarakat dan perkembangan Tindak Pidana, Tindak Pidana Upal khususnya yang berkembang masih didapat adanya pengulangan Tindak Pidana Upal yang dilakukan (Residivis).

Berdasarkan analisis mengenai kebijakan legislatif, hukum pidana di bidang Upal yang diuraikan dalam pasal-pasal KUHP tentang Pengaturan Upal di negara RI, serta prinsip-prinsip dalam kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto mengenai kriminalisasi¹³² kebijakan hukum pidana di bidang Upal masih menunjukkan beberapa kelemahan yang prinsipil.

Mengingat masih adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan hukum pidana antara lain pada jenis sanksi pidana pada tindak pidana upal dan pentingnya diberikan sanksi berat pada pelaku, apalagi Residivis.

Berikut beberapa pemikiran penulis tentang kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana (KUHP) di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut :

- a. Penulis sependapat dengan konsep Tahun 2000 pada pidana tambahan Pasal 126 ayat 1 mengenai pemberatan pidana, dengan pertimbangan pelaku Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban jabatan, atau menyalahgunakan kekuasaan,

¹³² Lihat kembali pandangan Sudarto mengenai kriminalisasi.

penyalahgunaan profesinya, apalagi pelaku adalah residivis (sudah diatur pada Konsep 2000 Pasal 126 ayat 2) diterapkan pada pelaku Tindak Pidana Upal.

- b. Penulis sependapat pada Tindak Pidana Upal diberi sanksi berat mengingat jika tidak akan berkembang dan berakibat pada reputasi bangsa dan negara serta meresahkan masyarakat, maka Tindak Pidana Upal yang akan datang dengan sanksi pidana mati atau seumur hidup dan denda seberat-beratnya.
- c. Perlindungan terhadap korban tindak pidana upal dan penanggulangan keseimbangan nilai yang terganggu akibat pemalsuan uang di masyarakat, seyogyanya ditetapkan jenis sanksi pidana berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat jika memang diperlukan (bukan berarti delik tindak pidana uang palsu sama dengan delik adat, tetapi upaya penanggulangan tindak pidana uang palsu bagi korban dengan cara ganti rugi oleh pemerintah). Mengenai ide selektif dan limitatif penggunaan pidana penjara yang menjawab kritik dan kelemahan pidana penjara bukan berarti bahwa dengan ide ini akan ada penghematan dan pembatasan pidana penjara, mestinya harus ada jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat non custodial. Tindak Pidana Upal dengan ancaman pidana penjara 15 tahun pada Pasal 244 dan 245 KUHP yang pelaksanaan pidana alternatif, seyogyanya dijadikan pidana absolut. Khusus

Tindak Pidana Upal penulis mengusulkan dengan hukum mati atau setidaknya dengan pola maksimum umum 15/20 tahun penjara bagi pelaku yang tergolong pemberatan (Pasal 126 ayat 1 Konsep Tahun 2000). Dan seyogyanya dalam penanggulangan Tindak Pidana Upal juga memperhatikan faktor-faktor korelatif kriminogen, dan pasal-pasal Tindak Pidana Upal pada KUHP juga memandang masalahnya pada masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks pola penanggulangannya tidak simtomatik, tetapi kausatip (faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Upal). Disamping itu jenis sanksi pidana perumusannya dibuat tidak bersifat kaku dan imperatif.

Proses penyidikan Tindak Pidana Upal lebih menuntut biaya tinggi, penyidikan Tindak Pidana Upal diatasi dengan proses sidik yang cepat, tepat dan sederhana, sehingga ada paradigma baru dalam upaya penyidikan, dengan demikian ada perubahan pola penanggulangan Tindak Pidana Upal pada KUHP, dan diharapkan ada perubahan dalam pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform).

- d. Perlindungan terhadap korban dengan mengganti kerugian pada korban pemalsuan uang oleh pemerintah yang dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penggantian tersebut.

Seyogyanya dalam penanggulangan Tindak Pidana Upal juga memperhatikan faktor-faktor korelatif kriminogen, dan pasal-pasal Tindak Pidana Upal pada KUHP juga memandang masalahnya pada masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks pola penanggulangannya tidak simptomatik, tetapi kausatip (faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Upal). Disamping itu jenis sanksi pidana perumusannya dibuat tidak bersifat kaku dan imperatif, proses penyidikan Tindak Pidana Upal lebih menuntut biaya tinggi, penyidikan Tindak Pidana Upal diatasi dengan proses penyidikan yang cepat, tepat dan sederhana, sehingga ada paradigma baru dalam upaya penyidikan, dengan demikian ada perubahan pola penanggulangan Tindak Pidana Upal pada KUHP, dan diharapkan ada perubahan dalam pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform).

Dikatakan ada perubahan dalam penanggulangan dengan Hukum Pidana jika ada Penal Reform yakni Pembaharuan Hukum Pidana.

- e. Kemudian hendaknya hakim di dalam memutus Tindak Pidana Upal juga menggunakan ide *Elasticity of Sentencing* yaitu walaupun sanksi pidana diancam secara tunggal, tetapi di dalam penerapannya hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya dan walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif, tetapi dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif dan khusus Tindak Pidana Upal penulis juga

berpandangan walaupun sanksi sudah dijatuhkan dan sudah mempunyai keputusan hakim yang tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih selalu dapat dilakukan perubahan/peninjauan/penyesuaian kembali, agar pidana pada Tindak Pidana Upal ini tidak kaku, imperatif.

- f. Jenis sanksi pidana penjara (*strafsoort*) pada Tindak Pidana Upal yang tercantum di KUHP, hakim hendaknya di dalam memutus pidana menyesuaikan dengan situasi kondisi pelaku, pelaksanaan pidananya diikuti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang memadai sesuai dengan standard minimum rules dan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan.

Pada KUHP yang mengatur Tindak Pidana Upal dengan ancaman pidana tunggal 15 tahun penjara, maka penulis mengusulkan untuk menjadi pidana mati atau pidana seumur hidup, baik kepada pengedar maupun kepada pelaku utamanya. Pertimbangan pemberatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pelaku, misalnya Residivis pada Pasal 486 KUHP menyatakan bagi pemalsu, pengedar Residivis (Pasal 244, 247 KUHP) ditambah 1/3 dari ancaman pidana 15 tahun menjadi 20 tahun penjara. Penulis mengusulkan tetap pidana mati atau seumur hidup, disamping Residivis juga pelaku kejahatan yang berkaitan dengan

jabatannya, profesinya (Pasal 126 Konsep 2000) yang berhubungan dengan pembuatan uang.

Kemudian apabila ternyata Tindak Pidana Upal dilakukan oleh Korporasi sebagai subyek Hukum Pidana, maka yang menyangkut tanggung jawab korporasi dalam Hukum Pidana, maka pertanggungjawaban pidananya dibebankan terhadap para anggota atau pengurus korporasi.¹³³ Seperti halnya subyek Tindak Pidana Ekonomi pada orang/manusia (person) Pasal 3 UU No. 7/ Drt/1955 tetapi jika subyeknya badan hukum pada TPE (a legal person), Pasal 5 ayat 1 tetap sebagai pertanggungjawaban pidananya pada badan hukum¹³⁴.

- g. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Upal lebih tepat ditempatkan dalam UU khusus/tersendiri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Upal mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, seperti halnya negara-negara lain misalnya *Common Law* di Inggris.
- h. Berdasarkan pandangan mengenai masalah utama dalam kebijakan hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar, maka dalam perumusan suatu ketentuan pidana dalam

¹³³ Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, hal 43.

¹³⁴ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 35-36.

suatu UU sudah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan menggunakan pendekatan kebijakan (baik pendekatan nilai/moral maupun rasio/pemikiran).

Perumusan ketentuan pidana dalam suatu UU bukan sesuatu yang “begitu saja” ada dan “selalu harus” ada dalam UU, namun terkait dengan masalah nilai-nilai atau moral dan kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi serta kemampuan dari aparat penegak hukum (SDM) dan konsekuensinya. Demikian pula kecenderungan internasional harus tetap disesuaikan dengan nilai-nilai filsafati bangsa Indonesia.

Oleh karena itu dalam penyusunan RUU, khususnya dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana dan diancam dengan pidana serta menentukan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar harus melibatkan pakar kebijakan, hukum pidana dan kriminologi. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana baik dalam penentuan jenis pidana (*straf soort*), berat ringannya pidana (*straf maat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*straf modus*) sehingga dapat berfungsi secara efektif dan bermanfaat.

- i. Berkaitan dengan pertimbangan hakim, perlu juga secara tegas dinyatakan pentingnya perlindungan hukum bagi pengedar untuk membedakan dengan UU yang bersifat individual sebagaimana

UU dari negara-negara yang menganut paham liberal. Walaupun Upal pada dasarnya berkaitan dengan hal individu/kelompok (spesifikasi pelaku), namun bagi Indonesia bukan hanya untuk melindungi kepentingan individu/kelompok saja tetapi juga masyarakat dan negara. Hal ini menurut pandangan **Muladi** mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP), yang menyatakan bahwa SPP yang dianut Indonesia mestinya menganut model yang realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹³⁵

- j. Larangan untuk tidak dipublikasikan mengenai kejahatan Upal dari kebijakan Kapolri No. Pol. : Juklap/72/II/1993 tanggal 1 Pebruari 1993, dirasa kurang relevan, karena masalah Tindak Pidana Upal dan penanggulangannya adalah masalah serius yang harus ditangani oleh Badan-Badan Peradilan dan melibatkan seluruh masyarakat. Apalagi Upal merupakan ancaman factual yang meresahkan masyarakat yang dapat menurunkan kepercayaan internasional pada uang rupiah di negara kesatuan Republik Indonesia.
- k. Dalam rangka penegakan hukum pada Tindak Pidana Upal oleh penyidik banyak kendala yang harus dibenahi, baik SDM dari penyidik, sarana dan prasarana perundang-undangan yang

¹³⁵ Muladi, Ibid hal 16.

kurang memadai, operasional penyidikan dan juga pengambilan keputusan penyidik, yang oleh **Parson** pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pelbagai kendala baik yang bersifat normatif maupun situasional¹³⁶. Tindak Pidana Upal memakan biaya yang tidak sedikit, apalagi dalam menangkap mafia pelaku. Dengan demikian lembaga yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)*, Polisi, Jaksa dan Hakim pada Pengadilan hendaknya ada perubahan paradigma dalam menegakkan hukum dalam mencapai supremasi hukum, umumnya dan khususnya penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu.

- I. Kendala peradilan Tindak Pidana Upal, biasanya yang diadili sampai Pengadilan hanya pengedaranya saja, hanya sampai pada tingkat Peradilan Pertama di Pengadilan Negeri biasanya pelaku Tindak Pidana Upal ini adalah masyarakat yang berekonomi lemah, mudah terhasut dan dilakukan karena tekanan ekonomi. Oleh karena fenomena Tindak Pidana Upal sebagai penyebab tekanan ekonomi dan politik, maka pensosialisasian keaslian rupiah sangat penting dilakukan sebagai upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga/institusi-institusi terkait.

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, Ibid hal 36.

m. Hal lain yang perlu diperhatikan adanya pemisahan tindak pidana Upal yang dikaitkan dengan politik, sehingga jelas upaya-upaya penanggulangannya. Jangan kemudian melemahkan Sistem Peradilan, seperti fenomena dewasa ini, bahwa Tindak pidana murni dipolitikkan, dan masalah politik dikriminalisasikan, dengan demikian sulit untuk diadili/diproses pengadilan dengan hukum pidana.¹³⁷

n. Keresahan masyarakat timbul memuncak saat ditemukan Upal, uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 1999 dikacaukan dengan selebaran yang mencatat No Seri uang palsu tersebut, ternyata yang dicatat pada selebaran adalah Nomor-Nomor Seri Asli. Hal ini menunjukkan ada kegiatan pengacauan situasi masyarakat dan ada yang berkepentingan (politik), maka masyarakat jangan panik dalam menghadapi situasi yang tidak benar semacam ini.¹³⁸

¹³⁷ Lihat pandangan Dionysios Spinellis dalam "Top-hat Crimes" yang dikutip Barda Nawawi Arief pada Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana, Ibid hal 6.

¹³⁸ Moerjono, Wawancara Pribadi, Pimpinan BI Cabang Semarang, 23 April 2002 – dan dimuat pada berita KEKUATAN RELATIF Banyumas 23 April 2002 hal 1.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada permasalahan yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Legislatif (Formulatif) dalam KUHP yang mengatur Tindak Pidana Uang Palsu ada pada Buku II Bab X Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 Bis, 251, 252. Tindak Pidana Pemalsuan Uang hanya diatur pada Pasal 244 saja, sedangkan Pasal 245 delik penyebarannya. Pasal 246, 247, 249, 250, 250 Bis, 251, 252 adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Uang Palsu.
2. Kebijakan Yudikatif (Aplikatif) dalam menerapkan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Upal, nampak adanya keterikatan Hakim dalam memutus pidana dengan sanksi pidana yang dicantumkan pada pasal-pasal KUHP secara tunggal. Kebijakan Legislatif (Formulatif) yang akan datang, dengan sanksi pidana 15 tahun penjara kurang pas, walaupun adanya pengulangan tindak pidana bagi Residivis (Pasal 486 KUHP) ditambah 1/3 menjadi 20 tahun penjara juga kurang berat, karena meresahkan masyarakat dan berpengaruh terhadap kewibawaan negara. Dengan demikian seyogyanya perlu adanya penambahan jenis sanksi pidana dari pidana 15 tahun penjara dan 20 tahun penjara bagi pengulangan tindak pidana (Residivis) menjadi pidana mati atau seumur hidup ditambah pidana denda yang disesuaikan situasi dan kondisi pelaku.

3. Sistem pidana pada kebijakan legislatif (Formulatif) pada KUHP, yang mengatur tindak pidana uang palsu, jenis sanksi pidananya tunggal, seyogyanya menggunakan sistem alternatif yang senantiasa memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih sanksi pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku agar sistem pidana tidak bersifat kaku. Jenis pidana pada tindak pidana uang palsu pada pemalsuan uang yang ada pada Pasal 244 KUHP hanya jenis pidana penjara saja. Seyogyanya disamping jenis pidana penjara, ditambah dengan jenis pidana denda yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku. Kemudian hakim dalam memutus perkara disamping ada pertimbangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Kelemahan dari sanksi pidana pada tindak pidana uang palsu yang ada pada KUHP masih bersifat kaku, disamping itu penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana hanya menanggulangi **gejala saja** (simptomatik), tidak menanggulangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana (kausatif) seperti halnya penanggulangan tindak pidana uang palsu dengan hukum pidana.

4. Upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana Upal di masa yang akan datang akan menghadapi tantangan yang relatif berat. Hal ini disebabkan berkembangnya bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat termasuk teknologi informasi dan globalisasi ekonomi dan modus operandi dalam pemalsuan uang. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Upal harus

merupakan kebijakan yang integral antara kebijakan penal dengan non penal dan kebijakan yang bernuansa preventif, pre emtif dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

5. Penempatan suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan pendekatan kebijakan (baik pendekatan nilai/moral maupun rasio/pemikiran). Perumusan ketentuan pidana dalam suatu UU bukan sesuatu yang begitu saja ada dan selalu harus ada, namun terkait dengan masalah nilai-nilai, kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi dan kemampuan dari aparat penegak hukum serta konsekuensi beban biaya sebagai kendala dalam penyidikan Tindak Pidana Upal. Untuk itu dalam pembentukan suatu UU harus melibatkan para pakar kebijakan, hukum pidana dan kriminologi dengan harapan dapat terwujud adanya konsistensi dan keterpaduan kebijakan menuju peradilan yang lebih baik.

Dengan berdasar pada kesimpulan di atas, yang merupakan jawaban atas permasalahan, **beberapa saran/rekomendasi** dari penulis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat masih perlu adanya penyempurnaan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Upal dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam perumusan kebijakan penal di bidang Upal perlu juga dilibatkan para pakar kebijakan, hukum pidana dan kriminologi dengan harapan agar kebijakan yang dihasilkan memperhatikan prinsip-

prinsip kebijakan, penggunaan hukum pidana dan proses kriminalisasi, sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.

2. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang Upal secara integral perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses perumusan kebijakan penal oleh badan legislatif dan kebijakan penanggulangan tindak pidana bagi aparat yudikatif agar Tindak Pidana Upal tidak berkembang.
3. Perlu sosialisasi tentang keaslian Uang Rupiah bagi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, *Ahalisis Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1991.
- Adiwidjaya, Hari, *Profesionalisme dan Pengacara Sebagai Penegak Hukum Serta Kendala Yang Dihadapinya*, Semarang, 8 September 2000.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2000.
- Amirin Tatang M, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Amur Muchasim, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Politik*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 1999.
- Anang, Sulistyono, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997.
- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandarmaju*, Bandung, 1995.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- , *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bina Cipta Bandung, 1998.
- Bachtiar W. Harsja. *Ilmu Kepolisian – Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta, 1994.
- Barret Margreth, *Intellectual Property*, 2nd ed., Emanueal Law Outlines Inc., New York, 1996.
- Bemmelen J.M. Van, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- BPHN, *Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi*, Binacipta, Bandung, 1975.
- , *Simposium Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan Masyarakat*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Broto, Al. Wisnu, *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, Wisnu Siswacarita Press, Semarang, 1995.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Chambliss William dan Robert Seidman, *Law, Order and Power*, Addison Wesley Publishing Company, Philippines, 1971.
- Clarke, Michael, *Business Crime, Its Nature and Control*, St. Martin's Press, New York, 1990.
- Darmawan, Kemal, Moh., Purnianti, *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 : 107-109.
- Durkheim, Emil; *Aturan-Aturan Metode Sosiologi*, CV. Radjawali, Jakarta, 1985.
- Evers, Ph. H. dan R.M. Poesponegoro, *Pengantar Ilmu Hukum Oktroi*, PT. Pembangunan, Djakarta, 1955
- Faal M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, 1991 : 83-85.
- Friedmann. W. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kependidikan)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Friedman M. Lawrence, *Legal Culture and the welfare State*, dalam Gunther Tuebner, ed., *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin, 1986.
- , *Teori dan Filsafat Hukum*, vol. I, terj. M. Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Geis Gilbert dan Robert Meier, ed., *White Collar Crime*, The Free Press, New York, 1977.
- Gunawan, Ilham; *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992.
- Gunarso D. Singgih Ny.; *Psikologi Untuk Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1978.
- Hadiati Hermien Koeswadji; *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum dan Pendidikan Hukum dan Hukum dan Bantuan Hukum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Hamdan M; *Politik Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986.
- , *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Politik Kekuasaan dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982.

- , *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah disampaikan pada *Seminar Upal*, Temanggung, 19 September 2001.
- Hartono Dimiyati, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind Hill Co, Jakarta, 1997.
- Hartono Sunarjati, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme)* dalam PJP II, Majalah Padjadjaran, Nomor I, Bandung, 1955.
- Hidayat Arief, *Prospek dan Tantangan Sistem Hukum Indonesia Pada Era Global*, Majalah Ilmiah UNDIP, Semarang, 1998.
- Hoefnagels G. Peter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Islam Irfan M., *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Johnson S. Alvin, *Sosiologi Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Komisi Hukum Nasional, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Cyber Consult, Jakarta, 1999.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun.
- Levin James, at. Al., *Criminal Justice, A Public Policy Approach*, Harcourt Brace Javanovich, New York, 1980.
- Lotulung, Effendi, Paulus, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, An English - Indonesia.
- Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, Mei 1987.
- Machrup Elrick, *Kapita Selekta Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Marpaung Leden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Milles B. Batthew and Huberman, Michael A; Terjemahan Rohidi Tjetjep; Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, April 1993.
- Muladi dan Nawawi Arief Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1992.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.
- , *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Nasikun; *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fisik UGM, Jogjakarta, 1974.
- Nawawi Arief Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994.
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, di Semarang, 25 Juni 1994.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana*, Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.
- Nurdin HK; *Perubahan-Perubahan Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana*, Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.
- Packer L. Herbert, *The Limits of Criminal Sanction*, University Press, California, 1968.
- Peters A.A.G. dan Siswo Soebroto Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, PT. Sinar Agape Press, Jakarta, 1988.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

- Praja S. Juhaya dan Syahibuddin Ahmad, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Aksara, Bandung,...
- Prodjo Dikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Purwa Hadi Wardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Rahardjo Satjipto, Tabah Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1976.
- , *Pendidikan Hukum Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, FH UII, Yogyakarta, 1982.
- , *Hukum Polisi dan Residivis*, Seminar tentang Kajian Penjahat Kambuhan/Residivis dan Pembinaannya, Jakarta 14 s/d 15 Januari 1992.
- S. Johnson Alvin, *Sosiologi Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sanoesi M., *Kepala Kepolisian RI, Sambutan Pada Seminar Kriminologi V*, di Semarang, 11 Nopember 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985
- , *Penelitian Hukum Kumulatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soekanto Soerjono, *Fungsionalisasi Dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1968.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- , *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- , *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soeropati Dentoeny, *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satyawacana, Salatiga, 1999.

- Subekti R, *Hukum Pembuktian, Prandya Paramita*, Jakarta, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986.
- , *Hukum Pidana I*, cet. II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudjono S. Brodjo, "*Kataklisme*", *Budaya Malu dan Peran Polisi*, Harian Suara Merdeka, Semarang, 8 Desember 2000.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suherman E, *Kemajuan Teknologi Suatu Tantangan Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1988.
- Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Lembaga dan Pranata Hukum Dalam SPP*, Semarang, 1995.
- , *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1999.
- Susilo Salahudin, *Menegakkan Amanat Reformasi Melalui Reformasi Mental 2002*, sebuah IJTihad Politik, Kajian ke 17, Forum Kajian Kontemporer Islami, Semarang, 2002.
- Sutarto Suryono, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendekia Purna Dharma, Semarang, Akhir Oktober 1987.
- Wahab Abdul Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Wahid Abdul, Sulistiyo Anang, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997.
- Wahyono Padmo, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negera Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Wardoyo Purwo, Hadi AL, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.
- Wibawa Samodra, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisa*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Widiyanti Ninik dan Waskita Julius, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Zietlin M Irving; *Memahami Kembali Sosiologi*, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer, Gajah Mada Press, Jogjakarta, 1995.

Makalah

Atmasasmita Romli, *Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994.

Muladi, *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 1994.

Nawawi Arief Barda, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, Penataran Metode Penelitian Hukum, Unsoed. Purwokerto, 1995.

Wignyosoebroto Sutandyo, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, Pembinaan Tenaga Peneliti 1980.1981, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Lapangan, data, Kebijakan-Kebijakan Kapolri, Bank Indonesia dan Surat Kabar;

Bank Indonesia, *Materi Penyuluhan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Semarang, 2001.

-----, *Uang Kertas rupiah Indonesia*, Semarang, 2001.

-----, *Materi Penyuluhan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah*, Semarang, Oktober 2001.

Harian Suara Merdeka bulan Pebruari tahun 2000, Ditemukan Barang Bukti Uang Palsu Rp 4,7 Milyar di Polda Jawa Timur.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 1997, CV. Eka Jaya, Jakarta, 1997.

Inpres RI No. 1 Tahun 1971 tentang *Pembentukan BOTAS UPAL*.

Juklap No. Pol. : Juklap/72/III/1993 tentang Penyidikan Tindak Pidana Uang Palsu Bagi Satuan Reserse.

Juknis KAPOLRI No. Pol : Juknis/20/VIII/1991 tentang *Tata Cara Penanganan Barang Bukti Uang Palsu*.

Juknis /21/VIII/1991 tentang *Sistim Laporan Kasus Uang Palsu*.

Juknis /25/VIII/1991 tentang *Penyidikan dan Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*.

KUHAP, Karya Anda, Surabaya – Indonesia, 1983.

Mabes Polri, Mekanisme Penyidikan Uang Palsu, Jakarta, 2000.

UU No. 6 Tahun 1981 tentang *Pengesahan Konverensi Internasional mengenai Pemberantasan Upal*, Protokol (International Convention For The Supretion Of Counter Feiting Currency And Protocol Geneva, 1929)

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya – Indonesia.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Central.

UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Central LNRI Tahun 1968 No. 63 Tambahan LNRI No. 2865 yang telah diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 450/Pid.B/2000/PN Smg, tanggal 11 Oktober 2000.